

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012  
TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH PADA PRODUK SI WADIAH  
DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Diploma Tiga  
dalam Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**NAHLA NADIRA RAHMAH**

**NIM. 1605015021**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISOGO  
SEMARANG**

**2019**

H. Johan Arifin, S. Ag., M. M.  
Perum BPI Blok D No. 1 Ngaliyan, Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

---

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Tugas Akhir  
An. Sdri. Nahla Nadira Rahmah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara:

Nama : Nahla Nadira Rahmah  
NIM : 1605015021  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-  
MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam  
Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah  
pada Produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah  
Ungaran

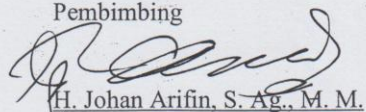
Dengan ini saya mohon kiranya tugas akhir saudara tersebut dapat  
segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 Mei 2019

Pembimbing

  
H. Johan Arifin, S. Ag., M. M.  
NIP. 19710908 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454  
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir saudara : NAHLA NADIRA RAHMAH  
NIM : 1605015021  
Judul : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PRODUK SI WADIAH DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup pada tanggal: 25 Juli 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2018/2019

Semarang, 30 Juli 2019

Ketua Sidang

**Choirul Huda, M. Ag**

NIP. 19760109 200501 1 002

Penguji 1

**Dr. Ratno Agrivanto, CA., CPA.**

NIP. 19800128 200801 1 010

Sekretaris Sidang

**H. Johan Arifin, S. Ag., M. M.**

NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji 2

**Muchammad Fauzi, S.E., M.M.**

NIP. 19730217 200604 1 001



Pembimbing

**H. Johan Arifin, S. Ag., M. M.**

NIP. 19710908 200212 1 001

## MOTTO

تَهَادُّوا وَتَحَبُّوا وَتَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ مِنْكُمْ

*“Hendaknya kamu saling memberi hadiah, saling mencintai, dan saling berjabat tangan, niscaya akan hilang rasa dengki dari kalian.” (H. R. Ibnu Sakir).*

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini Penulis dedikasikan kepada kedua orang tua, Ummi tercinta, Wasrifah, S. Pd. I., yang senantiasa mendidik mengasah asa, mengajarkan segala hal dengan kelembutan kata, menyelipkan doa saat bermunajat sembah, sedari Penulis usia belia hingga usia menuju senja.

Pun tak lupa kepada Abah terbangga, Saefur Rokhman S, Ag., sosok pejuang bagi keluarga, kehangatan dalam menjaga, dan menjadi penegur gagah saat Penulis lengah atas arah. Hingga Penulis menyadari, siklus hidup tidaklah mudah, untuk tidak jatuh kendati lemah, tidak lumpuh kendati sehat raga tak ramah, tentu dengan petuah dan titah penuh hikmah.

Kakek Wasmun (Alm) dan Nenek Murinah, sosok sederhana penuh wejangan sarat makna, yang selalu mengingatkan Penulis untuk menambah budi pekerti walau hierarki pendidikan bertambah tinggi, membesut kedewasaan yang harus digali agar yang terlihat ialah kemuliaan hati.

Kepada saudara Penulis, Fine Aghnia Rahmah dan Nasywa Kamila Rahmah, Srikandi yang selalu memotivasi Penulis untuk giat menyelesaikan studi, menjaga diri, mandiri, dan meruwat hati.

Juga Ibnu Anshori yang hangat atas semangat terselesaikannya karya ini, menemani pengumpulan materi hingga partner berdiskusi, terlebih peredam emosi atas kerasnya ambisi sembari memberi patri untuk tetap sholat, sehat, dan istirahat.



## DEKLARASI KEASLIAN

Dengan didasari kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi hasil plagiarisme milik orang lain. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan. Dengan kata lain, karya ilmiah ini murni hasil kontempalsi mendalam penulis.

Semarang, 28 Mei 2019



Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nahla Nadira Rahmah".

**NAHLA NADIRA RAHMAH**

NIM. 1605015021

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan tugas akhir ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan hurufdan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	a	a



---◌---	Kasrah	i	i
---◌---	Dhammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ◌---	fathah dan ya`	ai	a-i
وَـ◌---	fathah dan wau	au	a-u

### c. Vokal Panjang (*maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya`	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya`	ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	ū	U dan garis di atas

Contoh:    قَالَ    -    qāla  
                  قِيلَ    -    qīla  
                  يَقُولُ    -    yaqūlu

## ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan salah satu strategi berupa pemberian hadiah guna menarik minat anggota agar semakin meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Hadiah tersebut diberikan sebagai apresiasi dan bentuk terima kasih kepada anggota. Pada BMT Al-Hikmah Ungaran, terdapat salah satu produk unggulan, yaitu Si Wadiah, yang merupakan kependekan dari Simpanan Wajib Berhadiah. Produk ini menggunakan akad wadiah, di mana LKS boleh memberikan bonus kepada anggota. Di BMT Al-Hikmah Ungaran, bonus tersebut berupa hadiah yang dibagikan dengan cara pengundian. Berkaitan dengan hal ini, terdapat ketentuan tentang pemberian hadiah yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana mekanisme pemberian hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran pada produk Si Wadiah? (2) Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Al-Hikmah Ungaran? Permasalahan tersebut dibahas melalui studi/penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di BMT Al-Hikmah Ungaran. Adapun data yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dirangkum, dipilih kemudian dianalisis dengan teknik analitis secara kualitatif (deskriptif analitis).

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme pemberian hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran pada produk Si Wadiah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dengan takaran bonus yang tidak dapat ditentukan persentasenya. Bonus tidak diberikan setiap bulan, melainkan diberikan pada bulan ke-25 dalam bentuk hadiah yang dibagikan dengan cara diundi. Syarat dan ketentuan dalam produk ini ialah menjadi anggota BMT Al-Hikmah Ungaran, membayar biaya administrasi, dilaksanakan berkelompok (satu kelompok terdapat 100 anggota), dan jangka waktu menabung selama 24 bulan. (2) Implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Al-Hikmah Ungaran terdapat beberapa ketentuan yang sesuai dan tidak sesuai. Ketentuan yang sesuai ialah mengenai sumber dana, penentuan penerima hadiah, cara pemberian hadiah, serta syarat dan ketentuan hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga. Ketentuan yang tidak sesuai ialah perihal wujud/bentuk hadiah karena terdapat hadiah berupa uang, yaitu tabungan Si Rela senilai Rp500.000,-. Selanjutnya, waktu pemberian hadiah produk Si Wadiah diberikan pada akhir periode, yaitu pada bulan ke-25, serta adanya perjanjian hadiah di awal akad. Selain itu, pemberian hadiah dilakukan setiap tahun. Hal ini menunjukkan kelaziman atau *'urf*, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah terdapat larangan tersebut.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah), DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

## ABSTRACT

Sharia financial institutions (LKS) took one strategy which was gift-giving to attract a member interest in order to increase confidence and loyalty. The gift was granted as an appreciation and the form of thanking members. At the BMT Al-Hikmah Ungaran, there was one of the superior products, named *Si Wadiah*, which was the short of *Simpanan Wajib Berhadiah* (the conscripted deposits). This product used *akad wadiah*, which might be given the members bonus by LKS. BMT Al-Hikmah shared the bonus by giving gift in a draw. Related to this topic, there was a provision for gift-giving that was written on fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 about prize in fund compilation of the financial institution of sharia. The study was intended to answer problems: (1) How the gift-giving mechanism at BMT Al-Hikmah in *Si Wadiah* product? (2) How the implementation of DSN-MUI fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 about prize in fund compilation of sharia financial institution at BMT Al-Hikmah Ungaran? The problems were discussed through a study/field research which was held at the BMT Al-Hikmah Ungaran. The data was collected by doing interviews and taking documentation. Data that was acquired are summarized, selected to be analyzed by qualitatively analytic techniques (analytic descriptive).

The study showed that: (1) the gift-giving mechanism of BMT Al-Hikmah Ungaran on the *Si Wadiah* product used the *akad wadi'ah yad dhamanah*, whose undetermined bonus measure. Bonuses were not given each month but were given at the 25th month in gifts distributed by drawing lots. The terms and conditions in this product was being a member of BMT Al-Hikmah Ungaran, paying administrative fees which was paid in a group (one group contained of 100 members), and a period of 24 months of savings. (2) On the implementation of DSN-MUI's fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 about gift of funding in sharia financial institution at BMT Al-Hikmah Ungaran was found some appropriate and inappropriate provisions. The appropriate provisions were source of funds, stipulation of gift, determining of receiving the gift, and ways of giving the gift in the third party funds deposits. Whereas, the inappropriate provisions were the form of gift because there was a gift in the form of money which was *Si Rela* saved IDR 500.000,-. In addition, the time for giving *Si Wadiah*'s gift of product was given at the end of the contract period in month 25, and there was the gift agreement at the beginning of the contract. In the other way, giving the gift was done every year. This showed prevalence or '*urf*', whereas DSN-MUI fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 about gift of funding in sharia financial institution figured the prohibition.

Key words: sharia financial institutions (LKS), *Si Wadiah* (*Simpanan Wajib Berhadiah*), DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis persembahkan atas segala anugerah yang diberikan Allah SWT, berupa akal sehat yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk laknat. Meretas batas jumud menjadi dunia yang tak sesuram kabut. Meregas jalan buntu menjadi hidup yang bermutu dengan ilmu yang segenap titik dadu.

Pun sholawat seiring salam tak enggan Penulis sanjungkan kepada manusia teladan penuh keistimewaan, Muhammad SAW, berkat gigih perjuangannya, nikmat iman dan Islam hangat dirasakan, terlebih ajaran mengenyam pendidikan yang tak mengenal batasan.

Atas terselesaikannya Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran”**, Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan dukungan moril maupun materil. Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M. Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S. Ag, M. M., Ketua Program studi D3 Perbankan Syari'ah sekaligus pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Muhari, Kepala Pusat BMT Al-Hikmah Ungaran beserta staf dan karyawan yang berkenan memberikan data yang penulis perlukan.
5. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terlebih keluarga program D3 Perbankan Syariah di UIN Walisongo Semarang dan seluruh dosen yang memberi ilmu sebagai modal awal terselesaikannya karya ini.
6. Keluarga besar Perbankan Syariah (PBS) angkatan 2016, terkhusus PBSA terimakasih atas sinergi dalam belajar bersama.
7. Semua pihak yang berkontribusi aktif terselesaikannya karya ini, namun tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak celah kekurangan atas penulisan karya ini, baik dari segi materi yang tersajikan maupun diksi penulisan. Kendati jauh dari kesempurnaan, Penulis berharap semoga karya ini tetap terselip nilai manfaat bagi para pembaca. Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn.

Semarang, 28 Mei 2019  
Penulis,

**Nahla Nadira Rahmah**  
NIM: 1605015021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Landasan Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Penghimpunan Dana .....	21
B. Hadiah .....	33
C. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah .....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL-HIKMAH UNGARAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hikmah Ungaran .....	38



B. Profil BMT Al-Hikmah Ungaran .....	39
C. Struktur Organisasi dan Tugas di BMT Al-Hikmah Ungaran.....	41
D. Ruang Lingkup Usaha BMT Al-Hikmah Ungaran .....	49
<b>BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PRODUK SI WADIAH DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN</b>	
A. Mekanisme Pemberian Hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran pada Produk Si Wadiah.....	58
B. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

2.1 Hibah, Hadiah, Sedekah, dan <i>'Athiyah</i> .....	34
3.1 Nisbah Bagi Hasil Si Suka .....	52
4.1 Jumlah Penerima Hadiah Si Wadiah.....	61
4.2 Daftar Hadiah <i>Grand Prize</i> Si Wadiah Tahun 2019 .....	61
4.3 Daftar Hadiah Umum Si Wadiah Tahun 2019 .....	61
4.4 Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.....	64

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Dalam *uṣūl al-fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib*, yaitu sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan.<sup>1</sup> Mencari nafkah, yakni kegiatan ekonomi ialah wajib. Oleh karena pada zaman modern ini kegiatan ekonomi tidak sempurna tanpa adanya lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank mutlak diadakan. Dengan demikian, kaitan Islam dengan lembaga keuangan menjadi jelas dan koheren.

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit defisit dengan unit surplus,<sup>2</sup> yaitu suatu lembaga perantara di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana. Secara keseluruhan, lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari tiga kegiatan yang dilakukannya, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa. Pada lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar syaria'ah tersebut, terkumpul dalam kalimat *tamaghadirr*, yaitu *tadlīs* (penipuan), *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *ḍarar* (kerusakan), *ribā* (tambahan), dan *risywah* (penyuapan).

Sudah menjadi rahasia umum, lembaga keuangan syariah meliputi lembaga keuangan bank dan non bank yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu contoh lembaga keuangan syariah non bank adalah BMT, yang merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tanwil. Secara etimologi, *baitul*

---

<sup>1</sup>Firda Zulfa, *Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmarman Azwar Karim*, vol. 1, Desember 2015, h. 28.

<sup>2</sup>Unggul Priyadi dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yoyakarta, 2018, h. 1.

*māl* berarti rumah dana yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana, sedangkan *baitul tanwil* berarti rumah usaha, berfungsi sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*)<sup>3</sup>. Dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dimaksud, BMT melakukan pemasaran (*marketing*), promosi atau kegiatan lainnya yang berupa pemberian hadiah/cinderamata pada saat pembukaan rekening, dan undian yang bersifat material seperti hadiah kendaraan, atau perjalanan ibadah haji/umrah.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam upaya memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan yang berkaitan dengan ibadah maupun kebutuhan yang berkaitan dengan muamalah. Semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia, semakin meningkat pula persaingan dalam dunia usaha, hal ini termasuk dalam perkara muamalah.

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣūl* yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشباه والنظائر في قواعد

فقه الشافعية، الجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، و فروع

(1987، ص. 133)

Artinya: “Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. (*Al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu Fiqh asy-Syafiiyah*, Jalal ad-Din Abd ar-Rahman Ibnu Abu Bakar as-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987, h. 133).<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014, h. 120.

<sup>4</sup>Ika Syarifatun Nisa, “Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018, h. 79, t. d.

Prinsip tersebut memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun di sisi lain, hal tersebut juga membuka peluang praktik yang tidak diinginkan, laiknya melakukan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan kaidah muamalah.

Pada konteks BMT, berbagai strategi digunakan dalam memasarkan produk. Salah satu strateginya ialah memberikan hadiah menarik untuk menambah minat nasabah/anggota. Strategi pemberian hadiah ini diterapkan pada produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *wadi'ah* dan *muḍarabah*. Hal tersebut dibolehkan dalam Islam sebagaimana hadits sebagai berikut:

تَهَادُّوا وَتَحَبُّوا وَتَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ مِنْكُمْ

Artinya: “Hendaknya kamu saling memberi hadiah, saling mencintai, dan saling berjabat tangan, niscaya akan hilang rasa dengki dari kalian.” (H. R. Ibnu Sakir).<sup>5</sup>

Berdasarkan hadits di atas, pemberian hadiah pada dasarnya dianjurkan, dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariah, salah satunya adalah fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Sebagaimana lembaga keuangan syariah pada umumnya, BMT memiliki produk penyimpanan/pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*) dengan bermacam akad yang diterapkan. Produk penyimpanan dana menerapkan akad *wadi'ah* dan *muḍarabah*, sedangkan produk pembiayaan menerapkan akad *musyarakah*, *murabahah*, *mudarabah*, *ijarah*, dan lain sebagainya. Akad-akad tersebut dibahas dalam *fiqh muamalah*.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang ingin tetap eksis dalam perkembangan zaman, BMT Al-Hikmah Ungaran menerapkan strategi

---

<sup>5</sup>Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 24.

pemberian hadiah pada salah satu produk penghimpunan dana. BMT yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman No. 12 Mijen, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang ini memberi nama produk tersebut dengan Si Wadiah, yang merupakan kependekan dari Simpanan Wajib Berhadiah.

Adapun fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 memperbolehkan lembaga keuangan syariah memberikan hadiah kepada nasabah atau anggotanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan tersebut yaitu:

1. Ketentuan terkait Pihak yang Berjanji (*Wa'id*)

- a. Hadiah promosi diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak dalam bentuk uang;
- b. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang berwujud, baik *haqiqiy* maupun wujud *hukmiy*;
- c. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
- d. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
- e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadiah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadiah*;
- f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
- g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya;
- h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;
- i. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.



## 2. Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

- a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal:
  - 1) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana
  - 2) Berpotensi praktik *risywah* (suap), dan/atau
  - 3) Menjurus kepada riba terselubung
- b. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maysir*), gharar, riba, dan *akl al-māl bil bāṭil*;
- c. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

## 3. Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga<sup>6</sup>

LKS boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat:

- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
- b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
- c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan/ *'urf*).

Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat beberapa hal yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian. Pertama, BMT Al-Hikmah Ungaran memberikan hadiah kepada anggotanya setelah terjadi akad. Hadiah diberikan satu kali dalam satu periode yang dilaksanakan pada akhir periode.

Kedua, hadiah-hadiah yang diberikan BMT Al-Hikmah Ungaran bermacam-macam. Sebagaimana yang tertulis dalam brosur, hadiah-hadiah tersebut adalah 1 unit sepeda motor sebagai *grand prize*, 1 unit mesin cuci, 1 unit lemari es, 1 unit *handphone*, 3 tabungan Si Rela masing-masing senilai Rp500.000,-, 6 unit kipas angin, 6 unit kompor gas 2 tungku, 9 blender, 9 sprei cantik, 21 lampu *emergency*, dan 43 bingkisan menarik.

---

<sup>6</sup>DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah MUI*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 300.

Ketiga, BMT Al-Hikmah Ungaran menjanjikan akan adanya hadiah pada awal akad *wadi'ah*. Hadiah yang akan diberikan disebutkan di awal akad.

Keempat, hadiah diberikan dengan cara *qur'ah* (pengundian).<sup>7</sup> Dalam praktiknya, hadiah yang diberikan kepada anggota merupakan suatu bonus yang tidak ditambahkan secara langsung pada saldo tabungan anggota. Dalam hal ini anggota tidak mengetahui hadiah apa yang akan didapat, karena hadiah dibagikan dengan cara pengundian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tergerak untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait mekanisme pemberian hadiah oleh BMT Al-Hikmah Ungaran yang kemudian dianalisis dengan teori fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Sejalan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran pada produk Si Wadiah?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Kegiatan penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif selalu memiliki tujuan tertentu yang harus jelas sejak awal penelitian direncanakan. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup>Brosur Produk Si Wadiah BMT Al-Hikmah Ungaran.

- a. Mengetahui mekanisme pemberian hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran pada produk Si Wadiah.
- b. Mengetahui sejauh mana implementasi fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Produk Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik untuk akademisi maupun non akademisi secara praktis dan teoritis. Manfaat penelitian ini adalah:

### a. Secara Teoritis

Dari segi teoritis hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana mekanisme pemberian hadiah yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat membawa manfaat bagi para pembaca termasuk akademisi terutama penulis.

### b. Secara Praktis

Dari segi praktis, secara umum hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk lebih memahami transaksi yang sesuai dengan syariah. Sedangkan secara khusus hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atau perbaikan bagi BMT Al-Hikmah Ungaran, sehingga BMT Al-Hikmah Ungaran dapat mengimplementasikan prosedur dan mekanisme pemberian hadiah yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu, BMT Al-Hikmah dapat menjadi sarana yang tepat untuk bertransaksi sehingga mencapai tujuan syariat.

## D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini, penelitian tentang undian berhadiah di lembaga keuangan syariah telah banyak dibahas dalam berbagai karya penulisan, baik berupa makalah, jurnal, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, maupun buku. Untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terkait bahasan

di atas, penulis berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu sebagai referensi.

Berikut adalah jurnal yang disusun oleh Khoirun Nisak dan Irham Zaki yang berjudul “Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Hadiah dalam Produk Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa BMT UGT Sidogiri Pasuruan secara hampir keseluruhan menerapkan fatwa DSN khususnya pada fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Hadiah yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri dan sumber dananya sudah sesuai dengan ketentuan terkait hadiah yang ditetapkan melalui fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Undian hadiah ini tidak dipungut biaya apapun dari anggota. Selain itu, tidak adanya praktik *risywah* atau suap yang dilakukan oleh anggota terhadap pengurus. Hadiah di BMT UGT Sidogiri dilakukan setiap tahunnya, hal ini merupakan kelaziman yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, karena adanya niat anggota yang berubah dari menabung menjadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan tanpa adanya usaha. Ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 kecuali pada point ‘urf yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Selain itu, tugas akhir yang disusun oleh Lina Shofyana dengan judul “Pelaksanaan Program Undian Berhadiah di BPRS PNM Binama Semarang Ditinjau dari Fatwa DSN”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa praktik pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di BPRS Binama Semarang pada produk *taharah* dengan menggunakan akad *muḍarabah* ini dapat dinilai baik. Tabungan *taharah* ini diundi pada dua periode dalam setahun yaitu di bulan Januari dan Juli. Setiap nasabah yang mempunyai saldo rata-rata Rp1.000.000,- akan memperoleh 1 poin undian dan berlaku

untuk kelipatannya. Peserta adalah pemilik rekening tabungan taharah. Adapun dana yang digunakan untuk pembelian hadiah berasal dari bagi hasil yang diperoleh BPRS Binama itu sendiri. Penentuan pemenang yang berhak mendapatkan hadiah dilakukan dengan mekanisme undian poin. Pelaksanaan undian dilakukan pada akhir bulan Januari dan Juli dengan disaksikan direksi dan staf-staf dari BPRS PNM Binama. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, BPRS PNM Binama Semarang dinyatakan sudah memenuhi ketentuan fatwa tersebut dalam praktik pelaksanaan pemberian hadiah pada produk penghimpunan dana.

Selanjutnya, skripsi yang disusun oleh Rofika Febriani dengan judul “Analisis Pendapat Imam Syafi’i dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah atas Produk-produk *Funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur”. Penelitian ini menjelaskan terdapat dua cara pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, pertama, diberikan secara langsung untuk calon anggota berupa *souvenir* dan bonus untuk anggota. Kedua, diberikan dengan cara undian yang dilakukan satu tahun sekali di acara *halal bi halal* berupa hadiah atas produk-produk *funding* yang menggunakan akad *wadi’ah yad damanah*. Mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *funding* yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur secara umum diperbolehkan dan secara matematis senilai 89% sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i, 11% belum sesuai karena tidak semua anggota yang mengikuti undian akan mendapatkan hadiah. Adapun ditinjau dengan menggunakan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, secara matematis senilai 81% ketentuannya sudah diimplementasikan, 19% belum diimplementasikan, karena seharusnya hadiah atas produk simpanan dengan akad *wadi’ah yad damanah* diberikan sebelum terjadi akad *wadi’ah*, dan hadiah dalam simpanan DPK tidak diperjanjikan dan tidak menjadi suatu kebiasaan.

Berikutnya, jurnal yang disusun oleh Jaih Mubarak, Hasanudin, dan Yulizar D. Sanrego dengan judul “Fatwa tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah”. Kajian ini dilakukan untuk menggali hukum tentang pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah berupa cinderamata maupun hadiah yang bersifat material pada saat pembukaan rekening dengan cara undian. Berdasarkan deskripsi pada kajian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hadiah yang ditawarkan sebagai upaya pemasaran produk penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hanya relevan dengan produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *mu'awadhat*, yaitu giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposit *mudharabah*. Karenanya, promosi produk *mudharabah* menggunakan uang yang dititipkan, mengingat *wadi'ah* tersebut secara substantif sama dengan akad *qardh* yang tidak termasuk akad *mu'awadhat*. Kedua, pihak yang berhak menerima hadiah (*gift*) adalah pihak penyimpan sekaligus pemilik dana yang disimpan dalam bentuk tabungan/giro/deposito *mudharabah*. Karena itu, pejabat yang menempatkan dana kantor/perusahaan tempatnya bekerja, tidak berhak mendapat hadiah. Hadiah adalah milik kantor/perusahaan yang bersangkutan (bukan milik pribadi), kecuali hadiah tersebut bersifat immaterial. Ketiga, *ja'izah tasyji'iyah* pada prinsipnya tidak hanya dapat digunakan dalam promosi/pemasaran produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Tetapi, *ja'izah tasyji'iyah* dapat diimplementasikan dalam produk penyaluran dana, terutama apabila hadiah diharapkan dapat mengakibatkan disiplinnya nasabah lembaga keuangan syariah dalam mengembalikan dana milik lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan buku dan beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana pada produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran.



## E. Landasan Teori

### 1. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

Fatwa (Arab, فتوى, *fatwā*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban”, atau “pendapat”. Adapun fatwa yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>8</sup> Fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.

Fatwa mempunyai kedudukan yang penting dalam pandangan agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan hukum Islam yang terus berkembang serta belum terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits secara tekstual. Dalam penyusunannya, fatwa harus mempertimbangkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan utamanya. Namun, tidak semua orang dapat mengeluarkan fatwa. Fatwa hanya dapat dikeluarkan oleh para ulama. Di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI didirikan di Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta.<sup>9</sup> MUI bertugas untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan

---

<sup>8</sup>Rachmat Taufik Hidayat, dkk, *Almanak Alam Islami*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2000, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa>. Diakses pada 14/04/2019 pukul 16.23 WIB.

<sup>9</sup>Profil MUI dalam <https://www.mui.or.id>. Diakses pada 14/04/2019 pukul 17.03 WIB.

fatwa-fatwa tentang segala permasalahan kehidupan yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits secara khusus, mulai dari persoalan tentang kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran agama Islam, hingga hubungan seorang muslim dengan lingkungannya, termasuk ketentuan-ketentuan dalam bertransaksi ekonomi.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian Indonesia.<sup>10</sup> Segala persoalan ekonomi yang terjadi di masyarakat dipecahkan oleh DSN-MUI melalui susunan fatwa-fatwa yang dikeluarkan atas pertimbangan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Salah satunya, fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini membahas tentang ketentuan-ketentuan terkait hadiah, cara penentuan penerima hadiah, dan ketentuan hadiah dalam simpanan DPK.

## 2. Pengertian Hadiah

Hadiah yaitu pemberian yang dimotivasi atas dasar terima kasih dan kagum kepada orang yang diberi hadiah.<sup>11</sup> Pemberian hadiah dapat dalam bentuk penghargaan oleh seorang atasan kepada bawahan atas dasar prestasi yang telah dicapai, atau oleh sesama rekan sederajat. Hadiah dapat pula diberikan oleh seorang bawahan kepada atasannya sebagai ucapan terima kasih.

Orang yang diberi hadiah disunnahkan untuk membalas hadiah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. semasa hidupnya:

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ  
الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا

<sup>10</sup><https://dsnemui.or.id>. Diakses pada 14/04/2019 pukul 17.21 WIB.

<sup>11</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, h. 303.

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah r. a. ia berkata: “Rasulullah Saw. telah menerima hadiah dan telah membalasnya.” (H. R. Bukhari).<sup>12</sup>

Hadiah adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya paksaan dari keduanya dan bertujuan untuk membuat seseorang senang. Selain tanpa adanya paksaan, dalam pemberian hadiah pun dilarang untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Adapun yang dapat dijadikan landasan dalam pemberian hadiah yaitu firman Allah dalam surat Al-Mudatsir ayat 6 sebagai berikut.

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

Artinya: “Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh balasan yang lebih banyak.” (Q. S. Al-Mudatsir/74: 6).

### 3. Penghimpunan Dana

Di bank syariah produk penghimpunan dana dapat berbentuk tabungan, giro, dan deposito. Produk penghimpunan dana di bank syariah menerapkan prinsip operasional syariah dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

#### a. Prinsip *Wadi'ah*

Menurut Abdurrahman Afandi dalam *Majma' al-Anhar fi Syarh Mulatalqa al-Abhar*, sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa dalam *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, *wadi'ah* disebut juga dengan istilah *idā'*, dan mendefinisikannya sebagai berikut.

إِلَّا يَدَاغُ تَسْلِيْطُ الْمَالِكِ غَيْرُهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ

Artinya: “*Al-Idā'* artinya penyerahan wewenang seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, ..., h. 304.

Si pemilik harta dinamakan *mudi'*, orang yang dipercaya untuk menjaga harta dinamakan *wadi'*, sedangkan benda/harta yang dititipkan tersebut dinamakan *wadi'ah*.<sup>14</sup>

Pada Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai berikut, “*Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.”<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah titipan dari seseorang kepada orang lain untuk dijaga dan dirawat. Ada dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* adalah suatu akad *wadi'ah* di mana barang atau dana yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad *wadi'ah* di mana barang atau dana yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi untuk kepentingan bisnis.

#### b. Prinsip *Muḍarabah*

Istilah *muḍarabah* berasal dari kata الضرب yang artinya memukul atau berjalan,<sup>16</sup> lebih tepatnya yaitu proses seseorang yang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa *muḍarabah* berasal dari kata الضرب في الأرض yang berarti melakukan perjalanan di bumi.<sup>17</sup> Definisi ini sesuai dengan firman Allah dalam Q. S. Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut.

---

<sup>13</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, h. 180.

<sup>14</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi*, Ed. 3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2012, h. 85.

<sup>15</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h. 180.

<sup>16</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012, h. 141.

<sup>17</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h. 149.

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."

*Muḍarabah* adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, terdiri dari pihak yang bertindak sebagai pemilik dana (*ṣahibul māl*) dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola dana (*muḍarib*). Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan pada awal akad. Sedangkan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana.

Ada dua jenis *muḍarabah*, yaitu *muḍarabah mutlaqah* dan *muḍarabah muqayyadah*. Kedua jenis ini berbeda dalam hal batasan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana. Pada *muḍarabah mutlaqah*, pengelola dana memberikan batasan berupa syarat-syarat tertentu kepada pengelola dana. Syarat-syarat tersebut di antaranya syarat mengenai lokasi, waktu, jenis usaha dan lain sebagainya.

Dalam *muḍarabah mutlaqah*, apabila terjadi kerugian bukan atas kelalaian pengelola dana, maka yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik dana. Sedangkan apabila pengelola dana mengubah syarat-syarat tertentu dan menimbulkan kerugian, maka pengelola harus menerima konsekuensi yang ditimbulkan.

Sedangkan *muḍarabah muqayyadah* adalah akad *muḍarabah* yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, waktu, dan jenis usaha oleh pemilik dana. Akan tetapi, kebebasan di sini adalah kebebasan yang tetap berada dalam syariat Islam.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah atau rangkaian sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data

serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Agar penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka penulis perlu menjelaskan metode penulisan yang digunakan, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di masyarakat.<sup>18</sup> Data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

#### 2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum dan mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>19</sup>

#### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah produk Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) pada BMT Al-Hikmah Ungaran.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BMT Al-Hikmah Ungaran tepatnya di Jalan Jend. Sudirman No. 12 Mijen, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

#### 5. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian. Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) BMT Al-Hikmah Ungaran, dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak.

---

<sup>18</sup>Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*, Jakarta: Esis, 2007, cet. 9, h. 106.

<sup>19</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010, h. 9.

- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Hadiah pada Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan. Data sekunder dimaksudkan untuk menunjang, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer. Data sekunder ini di antaranya adalah buku-buku tentang *fiqh mu'āmalah* dan buku-buku lain sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka, serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan pembahasan.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, menggunakan pedoman tertentu, dan dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.<sup>20</sup>

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan yang diajukan tidak terpaku pada pedoman wawancara sehingga dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Narasumber dalam wawancara ini adalah salah satu karyawan BMT Al-Hikmah Ungaran yang mempunyai peran cukup penting dalam manajemen maupun operasional BMT, yaitu kepala pusat BMT Al-Hikmah Ungaran.

b. Dokumentasi

---

<sup>20</sup>Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016, h. 3.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data menggunakan dokumen.<sup>21</sup> Menurut Lexy J. Moleong sebagaimana dikutip oleh Aji Damanuri dalam *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>22</sup> Dokumen-dokumen ini dapat berupa jumlah nasabah atau anggota, jumlah karyawan, atau data-data lain dari objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah data kantor yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu produk Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) di BMT Al-Hikmah Ungaran.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Metode atau teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Berdasarkan hal tersebut, teknik analisis data dibagi menjadi dua macam teknik, yaitu teknik analisis data secara kuantitatif dan teknik analisis data secara kualitatif.<sup>23</sup> Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif.

Dalam menganalisis data peneliti mengawali dengan merangkum data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu data mengenai mekanisme pemberian hadiah pada produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran. Selanjutnya, data yang telah dirangkum kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan sesuai dengan standar penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

---

<sup>21</sup>Nanang Martono et. al., *Kematian Sekolah Swasta*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, h. 19.

<sup>22</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, ..., h. 83.

<sup>23</sup>Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*, ..., h. 111.



Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari beberapa tahapan yang telah dilalui. Hal ini dimaksudkan untuk penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga permasalahan mengenai mekanisme pemberian hadiah pada produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran serta tentang implementasinya terhadap fatwa DSN-MUI no. 86/DSN-MUI/XII/2012 dapat dituangkan dalam hasil penelitian yang akurat dan mudah dipahami.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dilakukan melalui upaya yang sistematis agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Pada bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi keaslian, halaman transliterasi, halaman abstraksi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yang akan dipaparkan sebagai berikut.

Bab I, pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir. Bab ini adalah bagian yang akan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.

Bab II, merupakan landasan teori yang berisi uraian tentang produk penghimpunan dana, akad *wadi'ah* dan *muḍarabah*, hadiah, serta fatwa DSN-MUI no. 86/DSN-MUI/XII/2012. Tinjauan yang akan dibahas adalah pengertian *wadi'ah* dan *muḍarabah* meliputi dasar hukum, rukun, syarat dan jenisnya, mendeskripsikan pengertian hadiah, dasar hukum, rukun dan syarat hadiah. Selain itu, pada bagian ini juga diuraikan tentang pengertian dan kedudukan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Bab III, bab ini berisi tentang gambaran umum BMT Al-Hikmah Ungaran yang meliputi profil, sejarah, dan struktur organisasi. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan produk-produk yang ada di BMT Al-Hikmah

Ungaran, meliputi produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk pembiayaan (*financing*), serta menjelaskan tentang mekanisme pemberian hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran.

Bab IV, merupakan analisis tentang fatwa DSN-MUI no. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap mekanisme pemberian hadiah pada produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran. Pada bagian pertama bab ini menganalisis tentang praktik pemberian hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran, dan bagian kedua menganalisis tentang implementasi pemberian hadiah pada produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran berdasarkan fatwa DSN-MUI no. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Bab V, merupakan bab terakhir, terdiri atas kesimpulan peneliti yang menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan dengan memperlihatkan konsistensi kaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, pada bab terakhir ini juga berisi kritik dan saran untuk pengembangan studi selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana terdiri dari tiga jenis, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>1</sup> Secara umum, tabungan adalah simpanan nasabah pada bank yang dapat diambil sewaktu-waktu, namun tidak dapat diambil dengan cek, bilyet giro, dan sebagainya.

Pengertian giro menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian deposito menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dalam bank syariah, produk-produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito memiliki akad-akad tersendiri. Akad adalah kontrak antara dua belah pihak,<sup>4</sup> di mana syarat dan ketentuannya sudah ditetapkan secara spesifik. Ada dua akad yang digunakan pada produk penghimpunan dana, yaitu akad *wadi'ah* dan akad *muḍarabah*.

---

<sup>1</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, ed. 5, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, cet. 10, h. 357.

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, ..., h. 351.

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, ..., h. 363.

<sup>4</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, ..., h. 65.

### 1. *Wadi'ah*

Al-Syarwani mendefinisikan *wadi'ah* secara etimologi sebagai berikut.

مَا وَضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ لِحِفْظِهِ مِنْ وَدْعٍ إِذَا سَكَنَ ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْوَدِيعِ  
وَقِيلَ مِنَ الدَّعَةِ أَيْ الرَّاحَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ رَاحَتِهِ وَمُرَاعَاتِهِ

Artinya: “Barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, *wadi'ah* berasal dari kata ‘*wadu'a, yada'u*’ yang berarti ketika berada di suatu tempat, karena barang yang berada di tempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan *wadi'ah* berasal dari kata ‘*al-da'ah*’ yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada di tempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan.”<sup>5</sup>

Secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat di antara para *fuqaha*. Menurut Hanafiyah *wadi'ah* diartikan dengan penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sharih* maupun *dalalah*. Sedangkan Malikiyyah hampir mirip dengan Syafi'iyah yang mengartikan *wadi'ah* dengan perwakilan dalam menjaga harta yang dimiliki atau dihormati secara khusus dengan cara tertentu. Hanabillah mengartikan *wadi'ah* dengan akad perwakilan dalam penjagaan harta yang bersifat *tabarru'* atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaannya.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Al-Syarwani, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Digital Library, al-Maktabah Al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, dalam Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, cet. 2, h. 179. Imam Abdul Hamid bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwani al-Makki ialah pengarang kitab *Hawasyi al-Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, kitab rujukan yang memaparkan karya monumental al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami (Kitab *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, kitab fiqh terkenal yang menjadi rujukan para ulama mazhab al-Syafi'i pada zaman mutaakhir). Selain dikenal sebagai ulama besar di Mekah, ia juga merupakan penyambung tali Thariqah Naqsabandiyah Mudhdhariyah. Namun tidak banyak sejarawan yang menaruh perhatian lebih untuk menulis biografi tentangnya. Dalam beberapa tulisan disebut bahwa Al-Syarwani wafat pada 26 Dzul Hijjah tahun 1301 Hijriah/1814 M.

<sup>6</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 3.

Berdasarkan definisi di atas, terdapat dua kesimpulan mengenai pengertian *wadi'ah*. Pertama, *wadi'ah* merupakan suatu pernyataan dari seseorang yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk menjaga dan memelihara hartanya. Kedua, *wadi'ah* merupakan sesuatu atau harta yang dititipkan atau diwakilkan kepada seseorang untuk dijaga dan dipelihara.<sup>7</sup>

a. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Dasar hukum *wadi'ah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu ayat Al-Qur'an yang mensyariatkan *wadi'ah* adalah Q. S. An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (Q. S. An-Nisa/4: 58).

Sedangkan dasar hukum yang berasal dari Hadits adalah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدِّ لَأَمَانَةً إِلَى مَنْ أَنْتُمْنَاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda ‘Tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau khianati orang yang mengkhianatimu.’”<sup>8</sup>

Ijma' adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadi'ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi'ah*.<sup>9</sup> Sedangkan di Indonesia, akad *wadi'ah* ini mendapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 370-390.

<sup>7</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 3

<sup>8</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015, h. 255.

<sup>9</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h. 182.

b. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Berkaitan dengan rukun *wadi'ah*, beberapa ulama berbeda pendapat. Al-Jaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi dalam buku *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Dalam *sighah ijab* dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul. Menurut Syafi'iyah, *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu barang yang dititipkan, orang yang menitipkan dan menerima titipan, serta ijab dan kabul.<sup>10</sup>

Menurut Syafi'iyah, syarat barang yang dititipkan yaitu barang atau benda yang dapat dimiliki menurut syara'. Syarat bagi penitip dan orang yang menerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil. Sedangkan syarat ijab kabul ialah dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. Penerimaan atau kabul dapat berupa jawaban atau hanya dengan isyarat/diam.

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan Syafi'iyah, bahwa rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan kabul.<sup>11</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 370 menyebutkan rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu muwaddi'/penitip, mustawda'/penerima titipan, *wadi'ah bih*/harta titipan, dan akad.

Selanjutnya syarat-syarat *wadi'ah* dipaparkan oleh Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, dua tokoh teoretisi sekaligus praktisi dalam bidang

---

<sup>10</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, ...h. 206.

<sup>11</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ..., h. 182.

lembaga keuangan syariah. Syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Syarat orang yang mempunyai barang dan orang yang menyimpan
  - a) Pemilik barang dan orang yang menyimpan harus sempurna akal pikiran, pintar yakni mempunyai sifat *rusyd*, tetapi tidak disyaratkan cukup umur atau baligh. Orang yang belum baligh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikan *wadi'ah*.
  - b) Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain sebagainya.
- 2) Syarat Barang
  - a) Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.
  - b) Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.
  - c) Jika barang yang disimpan itu tidak tahan lama orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang mempunyai barang.

Sementara menurut kalangan Hanbaliyah, syarat dalam akad *wadi'ah* yaitu pihak yang melakukan akad harus berakal, baligh dan cukup umur (*rusyd*). Sedangkan barang yang dititipkan adalah barang yang secara syar'i tidak dilarang, barang harus dapat diserahterimakan.<sup>13</sup> Mayoritas ulama sependapat dengan kalangan Hanbaliyah.

#### c. Jenis-jenis *Wadi'ah*

*Wadi'ah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>14</sup> *Wadi'ah yad amanah* yaitu akad

<sup>12</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h. 183-184.

<sup>13</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h. 183.

<sup>14</sup>FORDEBI & ADESy, *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, h. 289.

penitipan harta baik uang maupun barang dengan ketentuan pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan tersebut. Oleh karena itu, pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan harta titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.

Jenis *wadi'ah* yang kedua yaitu *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu penitipan harta baik uang maupun barang dengan ketentuan harta titipan tersebut boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik harta. Maka dari itu pihak penerima titipan mendapat konsekuensi berupa pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan harta titipan. Oleh karena pihak penerima titipan ini diperkenankan untuk menggunakan atau memanfaatkan harta titipan, maka keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan harta titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

## 2. *Muḍarabah*

*Muḍarabah* berasal dari kata الضرب في الأرض yaitu bepergian untuk urusan dagang,<sup>15</sup> atau dapat pula diartikan melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* sebagaimana dikutip Sri Nurhayati dan Wasilah dalam buku *Akuntansi Syariah Indonesia*, menyebutkan bahwa *muḍarabah* secara bahasa diambil dari kata قرض atau القطع (potongan), maksudnya adalah pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha.

*Muḍarabah* merupakan bahasa Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut dengan istilah *qiradh*.<sup>16</sup> *Qiradh* berasal dari kata *qardh* yang

<sup>15</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, ..., h. 128.

<sup>16</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, ..., h. 141.



artinya potongan, sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja.<sup>17</sup>

Secara terminologi, *muḍarabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal).<sup>18</sup> Apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*ṣahibul māl*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*muḍarib*) dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian *muḍarib*.

Dalam *Fatawa al-Mu'ashirah* disebutkan bahwa *muḍarabah* dalam fiqh Islam merupakan salah satu jenis dari *syirkah* yang di dalamnya ada pokok modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Yadi Janwari dalam buku *Lembaga Keuangan Syariah*, *muḍarabah* merupakan akad di antara dua belah pihak, yang salah satu pihaknya menyerahkan modal kepada pihak lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai hasil kesepakatan kedua belah pihak.

PSAK 105 mendefinisikan akad *muḍarabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama (pemilik dana/*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*muḍarib*) bertindak sebagai pengelola.<sup>20</sup> Pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Menurut definisi ini, kerugian ditanggung oleh pemilik dana apabila kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaian pengelola dana.

---

<sup>17</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 245.

<sup>18</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Muḍarabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017 cet. 2, h. 159.

<sup>19</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 59.

<sup>20</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, ..., h. 128.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik benang merah bahwa *muḍarabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai *ṣahibul māl* (pemilik dana) dan pihak kedua sebagai *muḍarib* (pengelola dana). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian *muḍarib* (pengelola dana), kerugian tersebut ditanggung oleh *ṣahibul māl* (pemilik dana).

a. Dasar Hukum *Muḍarabah*

*Muḍarabah* memiliki landasan hukum dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma' dan qiyas. Landasan dari Al-Qur'an terdapat dalam Q. S. Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut.

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...berkeliaranlah di muka bumi mencari keridhoan Allah."  
(Q. S. Al-Muzammil/73: 20).

Selain ayat di atas, terdapat pula dalam Q. S. Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Q. S. Al-Jumu'ah/62: 10).

Selanjutnya adalah landasan berdasarkan Al-Sunnah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa dalam *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, yakni:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda, ‘Ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu: jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan, dan mencampur gandum dengan *syā’ir* untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”<sup>21</sup>

Pada hadits tersebut menyebutkan secara tegas akad *muḍarabah* dengan istilah *muqaradah* yang bermakna menyerahkan permodalan.

*Muḍarabah* juga disyariatkan berdasarkan ijma’ sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkannya *muḍarabah*, dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan:

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ

Artinya: “Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *muḍarabah*.”<sup>22</sup>

Selain itu, persyariatan *muḍarabah* juga dianalogkan atau diqiyaskan dengan *musāqah*. Kendati demikian, sebagian kalangan ulama tidak memasukkan qiyas sebagai landasan dalam akad *muḍarabah*. Sementara dalam konteks Indonesia, *muḍarabah* legalitasnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 238-253.

#### b. Rukun dan Syarat *Muḍarabah*

Rukun merupakan faktor-faktor yang harus ada. Rukun *muḍarabah* ada empat:<sup>23</sup> Pertama, pelaku (pemilik modal maupun pelaku usaha). Dalam akad *muḍarabah* minimal harus ada dua pelaku. Pelaku pertama bertindak sebagai *ṣahibul māl* (pemilik modal) dan pelaku kedua sebagai *muḍarib* (pelaksana usaha).

<sup>21</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Muḍarabah*, ..., h. 160.

<sup>22</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, ..., h. 154.

<sup>23</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 205.

Kedua, objek *muḍarabah*. Objek *muḍarabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍarabah*, dan pelaksana usaha mengerahkan kerjanya sebagai objek *muḍarabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang dikerahkan dapat berupa keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

Ketiga, persetujuan (ijab kabul). Persetujuan (ijab kabul) merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum*, yang artinya sama-sama rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela dan sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam akad *muḍarabah*. Pemilik dana rela berkontribusi dananya, dan pengelola usaha rela berkontribusi kerjanya.

Keempat, yaitu nisbah. Nisbah merupakan porsi bagi hasil.<sup>24</sup> Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. *Muḍarib* mendapatkan imbalan atas hasil kerjanya, dan *ṣahibul māl* mendapatkan imbalan atas penyertaan dananya.<sup>25</sup>

Akad *muḍarabah* dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat-syarat. Syarat yang dimaksud ialah syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat pertama yaitu yang berkaitan dengan pelaku atau pihak-pihak yang berakad. Baik *ṣahibul māl* maupun *muḍarib* harus cakap hukum dan *baligh*, tidak boleh salah satunya orang yang lemah ingatan atau anak kecil, bukan orang gila.<sup>26</sup> Dalam akad ini pihak-pihak yang berakad tidak disyariatkan harus muslim.

Kedua, syarat yang terkait dengan modal atau objek *muḍarabah*, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 115.

<sup>25</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 206.

<sup>26</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, ..., h. 249-250.

<sup>27</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 60.

- 1) Modal yang menjadi objek akad (*ra's al-maal* atau *ma'qud alaih*) mesti berupa mata uang (*nuquud*) yang berlaku dalam muamalah. Penetapan syarat ini disebabkan *muḍarabah* merupakan bagian dari *syirkah*, sedangkan *syirkah* itu tidak sah kecuali dengan mata uang, tidak boleh dengan barang dari perlengkapan rumah atau yang diriwayatkan menurut jumhur ulama, sebagai upaya pencegahan dari terjadinya ketidaktahuan keuntungan waktu pembagian.
- 2) Modal diketahui ukurannya. Apabila tidak diketahui, *muḍarabah* itu menjadi tidak sah. Karena ketidaktahuan modal akan membawa kepada ketidakjelasan keuntungan.
- 3) Modal harus sesuatu yang hadir, bukan utang. Tidak sah *muḍarabah* atas utang dan harta yang tidak ada secara *ittifaq*.
- 4) Modal diserahkan kepada *muḍarib* agar dapat berusaha dengan modal tersebut. Hal ini disebabkan modal merupakan amanat yang diberikan kepada *muḍarib*. Oleh karena itu, *muḍarabah* tidak sah kecuali ada penyerahan.

Selanjutnya yaitu syarat yang berkaitan dengan nisbah atau keuntungan. Syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

- 1) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, porsi bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *muḍarabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan. Jika keuntungan tidak jelas, akad dianggap rusak.
- 2) Porsi atau persentase bagi hasil hanya dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- 3) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *ṣahibul māl*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
- 4) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian bagi hasil, misalnya Rp1.000.000, Rp5.000.000 dan seterusnya. Hal ini dikarenakan keuntungan atau hasil yang diperoleh belum diketahui

---

<sup>28</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., h. 156-157.

jumlahnya. Sehingga bagi hasil ditentukan berdasarkan persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.

c. Jenis-jenis *Muḍarabah*

*Muḍarabah* terdapat dua jenis, yaitu *muḍarabah mutlaqah* dan *muḍarabah muqayyadah*.<sup>29</sup> Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *muḍarabah*.

1) *Muḍarabah Mutlaqah*

*Muḍarabah mutlaqah* adalah akad *muḍarabah* yang memberikan kebebasan kepada *muḍarib* (pengelola dana) dalam mengelola investasinya.<sup>30</sup> *Muḍarabah* ini disebut juga investasi tidak terikat atau *unrestricted investment*.<sup>31</sup>

Jenis *muḍarabah* ini tidak ditentukan oleh di mana lokasi bisnis akan beroperasi, kapan bisnis akan dimulai, dan bisnis apa yang akan dijalankan. Pengelola dana bebas menentukan tempat, waktu, dan bisnis apa yang akan dijalankan. Namun, kebebasan ini bukan merupakan kebebasan yang tidak terbatas. Kebebasan ini dibatasi oleh syariat Islam. Bisnis yang dijalankan tidak boleh bisnis yang dilarang dalam Islam, seperti penjualan narkoba, minuman keras, *trafficking* atau penjualan manusia, dan penjualan serupa yang tentunya dilarang dalam Islam.

Dalam jenis *muḍarabah* ini, pengelola dana bebas dalam menentukan bisnisnya. Namun, apabila dalam bisnis tersebut terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, maka yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik dana. Sedangkan jika kerugian tersebut disebabkan atas kecurangan atau kelalaian pengelola dana, kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola dana.

---

<sup>29</sup>FORDEBI & ADESy, *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, ..., h. 290.

<sup>30</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, ..., h. 130-131.

<sup>31</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, ..., h. 145.

## 2) *Muḍarabah Muqayyadah*

*Muḍarabah muqayyadah* adalah jenis *muḍarabah* dengan ketentuan pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana oleh pihak pemilik dana.<sup>32</sup> Jenis *muḍarabah* ini disebut juga investasi terikat atau *restricted investment*.<sup>33</sup>

Batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana kepada pengelola dana biasanya mengenai lokasi, tempat, waktu, dana atau investasi serta sektor usaha yang akan dijalankan. Pemilik dana menentukan bisnis apa yang akan dijalankan, di mana bisnis akan beroperasi, serta kapan bisnis tersebut akan dimulai. Apabila pengelola dana melanggar atau tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan.

## B. Hadiah

### 1. Pengertian Hadiah

Hadiah yaitu pemberian yang dimotivasi atas dasar terima kasih dan kagum kepada orang yang diberi hadiah.<sup>34</sup> Pemberian hadiah dapat dalam bentuk penghargaan oleh seorang atasan kepada bawahan atas dasar prestasi yang telah dicapai, atau oleh sesama rekan sederajat. Hadiah dapat pula diberikan oleh seorang bawahan kepada atasannya sebagai ucapan terima kasih.

Hibah, hadiah, sedekah, dan *‘athiyah* memiliki makna yang sangat berdekatan<sup>35</sup>, baik secara etimologis maupun terminologis. Perbedaannya terletak pada tujuannya. Perincian perbedaan antara hibah, hadiah, sedekah, dan *‘athiyah*, antara lain:

---

<sup>32</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, ..., h. 131.

<sup>33</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, ..., h. 146.

<sup>34</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, ..., h. 303.

<sup>35</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, ..., h. 437.

Tabel 2.1  
Hibah, Hadiah, Sedekah, dan ‘Athiyah<sup>36</sup>

No.	Nama	Konsep
1.	Hibah	Pemberian yang tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan pula untuk melahirkan rasa hormat serta cinta.
2.	Hadiah	Pemberian yang tujuannya untuk melahirkan rasa homat dan cinta.
3.	Sedekah	Pemberian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
4.	‘Athiyah (‘Athaya)	Pemberian seseorang kepada pihak lain pada saat sakit.

Orang yang diberi hadiah disunnahkan untuk membalas hadiah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. semasa hidupnya:

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ  
الْهِدْيَةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah RA ia berkata: “Rasulullah SAW telah menerima hadiah dan telah membalasnya.” (H. R. Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi).<sup>37</sup>

Hadiah adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya paksaan dari keduanya dan bertujuan untuk membuat seseorang senang. Selain tanpa adanya paksaan, dalam pemberian hadiah pun dilarang untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Adapun yang dapat dijadikan landasan dalam hal ini yaitu firman Allah dalam surat Al-Mudatsir ayat 6 sebagai berikut:

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

<sup>36</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, cet. 2, h. 3.

<sup>37</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, ..., h. 304.



Artinya: “Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh balasan yang lebih banyak.” (Q. S. Al-Mudatsir/74: 6).

## 2. Dasar Hukum Hadiah

Menurut *syara'*, hukum asal hadiah adalah sunnah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Aisyah RA berikut ini:

تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Artinya: “Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai.”

Ali Fikri menjelaskan bahwa hibah dan hadiah dapat melahirkan rasa cinta dalam hati serta dapat menghilangkan dendam dan permusuhan.<sup>38</sup>

Selain hadits di atas, terdapat pula hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sakir.

تَهَادُّوا وَتَحَبُّوا وَتَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ مِنْكُمْ

Artinya: “Hendaknya kamu saling memberi hadiah, saling mencintai, dan saling berjabat tangan, niscaya akan hilang rasa dengki dari kalian.” (H. R. Ibnu Sakir).<sup>39</sup>

Berdasarkan dua hadits tersebut, hukum pemberian hadiah adalah sunnah, begitu pula hukum menerimanya. Hadiah merupakan lambang kasih sayang antar sesama. Dengan saling memberi hadiah, akan timbul rasa kasih sayang dan hilangnya rasa dengki.

<sup>38</sup>Ali Fikri, *Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1938), dikutip dalam Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Medika, 2017, cet. 2, h. 4.

<sup>39</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, ..., h. 304.

### 3. Rukun dan Syarat Hadiah

Hadiah dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat hadiah adalah sebagai berikut.

- a. Orang yang memberi, yaitu orang yang memiliki benda yang dapat diberikan.
- b. Orang yang menerima hadiah, yaitu tidak terkait kepemilikan dengan hadiah yang akan diterima.
- c. Barang yang diberikan, yaitu bermanfaat, bernilai harta *syara'*, dapat berupa barang yang bisa dijual, dan barang tersebut harus ada ketika akad berlangsung.<sup>40</sup>

### C. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian hadiah di lembaga keuangan syariah terkait produk penghimpunan dana. Ketentuan fatwa tentang hadiah yaitu sebagai berikut.

1. Ketentuan terkait Pihak yang Berjanji (*Wa'id*)
  - a. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
  - b. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqiy* maupun wujud *hukmiy*;
  - c. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
  - d. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
  - e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadiah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadiah*;

---

<sup>40</sup>Lina Shofyana, "Pelaksanaan Program Undian Berhadiah di BPRS PNM Binama Semarang Ditinjau dari Fatwa DSN", Tugas Akhir, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 10-11.

- f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
  - g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya;
  - h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;
  - i. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada Nasabah, berikut operasionalnya.
2. Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah
- a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal:
    - 1) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana
    - 2) Berpotensi praktik *risywah* (suap), dan/atau
    - 3) Menjurus kepada riba terselubung
  - b. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maysir*), *gharar*, riba, dan *akl al-māl bil baṭil*;
  - c. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).
3. Ketentuan Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga
- LKS boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat:
- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
  - b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau

- c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan/ *'urf*).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah MUI*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 478-480.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BMT AL-HIKMAH UNGARAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hikmah Ungaran**

BMT Al-Hikmah merupakan sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya BMT ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri oleh 30 orang yang siap menjadi anggota/pendiri.<sup>1</sup>

Tujuan BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di Kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai ialah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha dan mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti rekam jejaknya, koperasi BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di komplek Pasar Babadan Blok B-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan BMT Al-Hikmah dipercayakan kepada 4 (empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penangguhan Pekerja Trampil (P3T) di Asrama Haji Donohudan, Solo.

Sampai saat ini tercatat 35 orang yang mengelola BMT Al-Hikmah. Dalam perkembangannya, BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama sepuluh tahun berdiri, jumlah anggota yang

---

<sup>1</sup>Aini Kholifatus Sa'adah, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) pada BMT Al-Hikmah", Tugas Akhir, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018, h. 30.

menanamkan modal pun meningkat dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai bulan Februari 2013 tercatat hampir 5.000 anggota aktif dengan nominal simpanan lebih dari 6 milyar. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan aset, tentu meningkat pula laba rugi setiap bulannya. Kemajuan dan perkembangan BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah Babadan.<sup>2</sup>

Saat ini BMT Al-Hikmah menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dengan kantor cabang di komplek Pasar Babadan Blok E 23-25, di Komplek Terminal Pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di Jl. Tirtomoyo No. 07 Bandungan, di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusun Secang 01/01, Samban Bawen, dan baru membuka cabang lagi di Jl. Raya Gunungpati-Boja Ds. Ngabean No. 05 Gunungpati Kota Semarang.

BMT Al-Hikmah ialah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. BMT Al-Hikmah memiliki badan hukum koperasi, dan mendapatkan akta pendirian No. 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat Jawa Tengah.

## **B. Profil BMT Al-Hikmah Ungaran**

### **1. Visi dan Misi BMT Al-Hikmah Ungaran**

#### **a. Visi**

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

#### **b. Misi**

1) Meminimalkan Non Profit Loan (NPL).

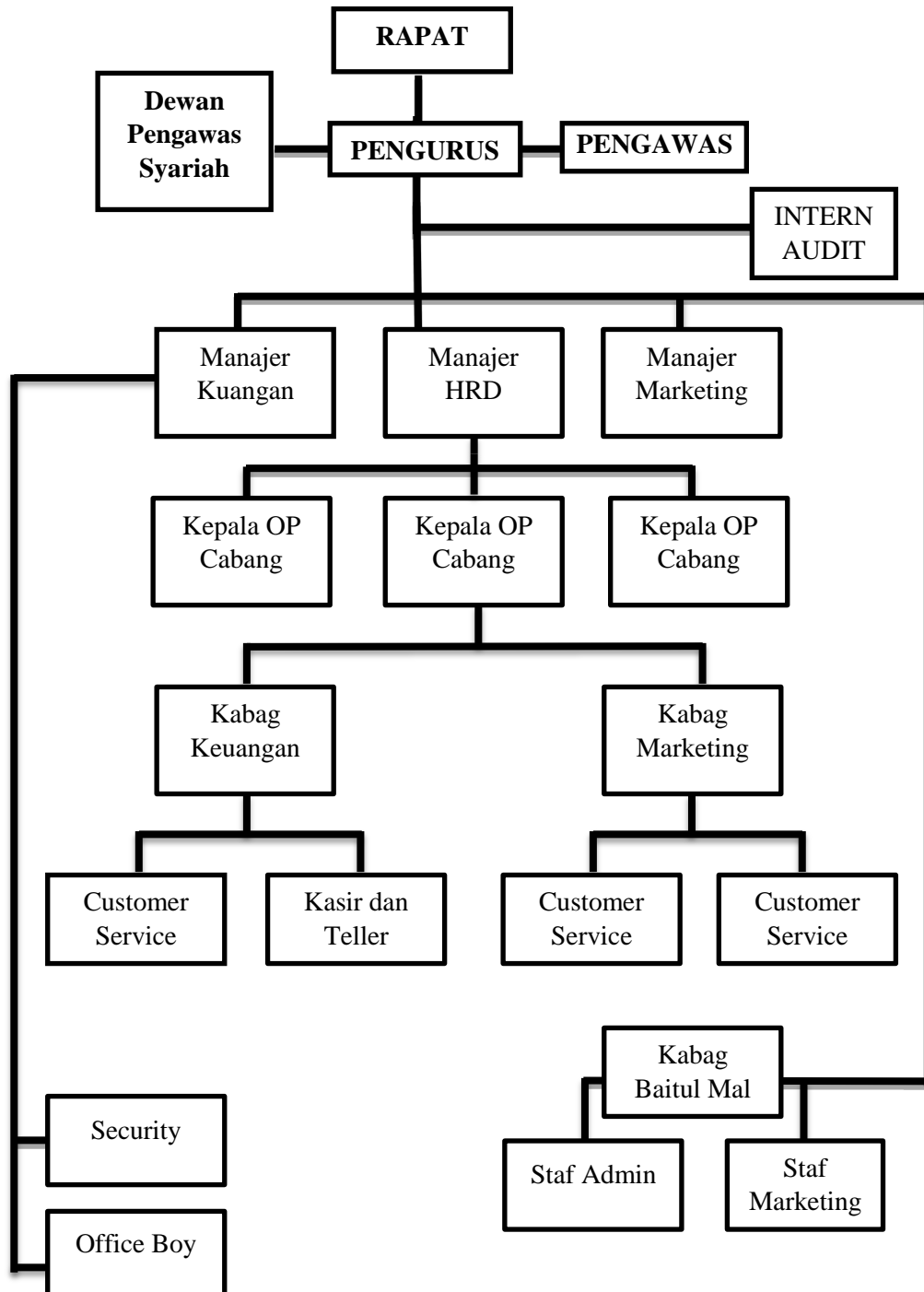
---

<sup>2</sup>Zahrotul Mufidah, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran", Tugas Akhir, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017, h. 25.

- 2) Memperbaiki struktur permodalan.
  - 3) Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota.
  - 4) Meningkatkan pendapatan koperasi.
  - 5) Menciptakan sumber daya manusia yang handal dan kompeten.
  - 6) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT.
  - 7) Menerapkan pengelolaan koperasi secara profesional.
2. Tujuan dan Sasaran BMT Al-Hikmah Ungaran
- a. Tujuan
    - 1) Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat dibawah dari situasi krisis ekonomi.
    - 2) Menambah modal masyarakat lapisan bawa dan kecil.
    - 3) Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.
  - b. Sasaran
    - 1) Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
    - 2) Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktivitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
    - 3) Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

### C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di BMT Al-Hikmah Ungaran

#### 1. Bagan struktur organisasi BMT Al-Hikmah Ungaran<sup>3</sup>



<sup>3</sup>Ima Nur Lindasari, "Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di KSPSS BMT Al-Hikmah Ungaran Kantor Cabang Gunungpati II", Tugas Akhir, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017, h. 31.



Adapun susunan manajemen dan pegawai BMT Al-Hikmah Ungaran Tahun 2019 adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

a. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Ketua : Drs. Toni Irianto
- 2) Anggota 1 : Dr. H. Muh. Saerozi
- 3) Anggota 2 : Abdurrohman

b. Pengawas

- 1) Ketua : Gatot Indramoko, S. E
- 2) Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi
- 3) Anggota 2 : Ichsan Maarif, S.T

c. Pengurus

- 1) Ketua : Muhari, S. Ag
- 2) Sekretaris : Awing Fraptiyo, S. E
- 3) Bendahara : Asroti, S. Pd. I
- 4) Staff Pusat : Isna Ira Setyawati, S. E
- 5) Office Boy : Nurkhasan

d. Kepala Operasional dan Pengelola Cabang

1) Kantor Cabang Mijen Gedanganak

- a) Kepala Operasional : Mudhofar
- b) Admin : Heni Fajar R, S.Pd
- c) Marketing : Dani Mahardika Safik  
Sayfur Rohman  
Dian Irfani, A. Md  
Saefudin

2) Kantor Cabang Babadan

- a) Kepala Operasional : Nurul Huda Amrullah
- b) Admin : Nur Janah
- c) Marketing : Zulikhan Yahya  
Salamti Nurul Ariyani

3) Kantor Cabang Bawen

---

<sup>4</sup>Struktur Kepengurusan BMT Al-Hikmah Ungaran Tahun 2019.

- a) Kepala Operasional : Supandriyo, A. Md
- b) Admin : Sefi Aprillia, A. Md
- c) Marketing : Adi Tiya
- 4) Kantor Cabang Karangjati
  - a) Kepala Operasional : Mujana
  - b) Admin : Putri Pertiwi
  - c) Marketing : Ahwat Adi Wibowo  
Fahrul Saktiana, S. E
- 5) Kantor Cabang Bandungan
  - a) Kepala Operasional : Sulamin
  - b) Admin : Yuni Fatmawati, S. E
  - c) Marketing : Masyudi, A. Md  
Yonanda
- 6) Kantor Cabang Gunungpati
  - a) Kepala Operasional : Eko Susilo, S. E
  - b) Admin : Kharis Muhandis, A. Md
  - c) Marketing : Abdul Chamid

## 2. Uraian tugas-tugas pokok pegawai BMT Al-Hikmah Ungaran<sup>5</sup>

### a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT. Rapat anggota dihadiri oleh anggota, pengurus, pengawas, dan tamu undangan. Rapat anggota membahas antara lain:

- 1) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT.
- 2) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 3) Penyusunan rencana kerja, RAPB BMT, serta pengesahan laporan keuangan.
- 4) Pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- 5) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

---

<sup>5</sup>Data diperoleh dari dokumen BMT Al-Hikmah Ungaran pada tanggal 26 April 2019.

- 6) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran BMT.
- 7) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Untuk melindungi kepentingan BMT, anggota, dan pihak ketiga, atas kelalaian pelaksanaan rapat anggota yang dilakukan pengurus dapat dikenakan tindakan berupa teguran dan peringatan tertulis dari anggota.

b. Pengurus

Tugas-tugas pokok:

- 1) Memimpin organisasi dan usaha BMT.
- 2) Menyelenggarakan RAT tepat waktu.
- 3) Melaksanakan hasil keputusan yang diamanatkan oleh RAT.
- 4) Mencukupi rasio modal.
- 5) Menyusun/merumuskan kebijakan umum, mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) BMT untuk mendapat persetujuan pada rapat anggota.
- 6) Menyelenggarakan rapat pengurus untuk evaluasi bulanan perkembangan kinerja lembaga dan menentukan serta membuat kebijakan strategi yang terkait dengan lembaga.
- 7) Menerima laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan pengelola setiap bulan.
- 8) Pengurus BMT dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

c. Dewan Pengawas Syariah

Tugas-tugas pokok:

- 1) Memastikan produk/jasa koperasi sesuai dengan syariah.
- 2) Menelaah dan mengesahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan (funding) maupun produk penggunaan dana (lending).
- 3) Mengkomunikasikan kepada DSN-MUI terkait usul dan saran pengembangan produk dan jasa BMT yang memerlukan kajian dan fatwa DSN-MUI.

- 4) Memberikan penjelasan kepada pengurus dan manajemen BMT tentang berbagai fatwa DSN-MUI yang relevan dengan bisnis BMT.
- 5) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
- 6) Menelaah dan mengesahkan tata laksana manajemen dan pelayanan BMT ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan akhlak Islam.
- 7) Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak manajemen dan staf BMT.
- 8) Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi (antar sesama manajemen/staf dan antar manajemen/staf dengan anggota dan masyarakat luas) dan transaksi bisnis serta melaporkannya kepada badan pengurus BMT.

d. Pengawas

Tugas pengawas:

- 1) Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan BMT.
- 2) Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional BMT sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota.
- 3) Memberi saran atau pendapat kepada pengurus dan pengelola untuk kemajuan BMT.
- 4) Melakukan pemeriksaan/audit.
- 5) Membuat hasil laporan pengawasan kepada rapat anggota.
- 6) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota di dalam suatu rapat anggota.
- 7) Jumlah pengawas minimal 3 (tiga) orang dan susunannya terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota.
- 8) Jumlah dan susunan pengawas dapat berubah sesuai dengan perkembangan BMT, tetapi harus gasal dan minimal 3 (tiga) orang.
- 9) Masa bakti pengawas sama dengan masa bakti pengurus.

e. Audit Internal

Tugas-tugas pokok:

- 1) Menggunakan fungsi pengawasan sebagai alat control mekanisme operasional.
- 2) Memeriksa semua catatan, harta milik dan hutang-hutang, memeriksa semua tingkat manajemen (kecuali top manajemen) dan dapat memasuki semua bagian dan unit kerja serta melakukan berbagai teknik pemeriksaan.
- 3) Meminta data/informasi yang berkaitan dengan hal audit kepada manajemen BMT.
- 4) Meminta fasilitas ke bagian umum untuk kebutuhan audit seperti ATK, dll.
- 5) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan pimpinan untuk keperluan publikasi.

f. Manajer/HRD

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya insani BMT termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan SDI serta pengembangannya.
- 2) Membuat sistem sumber daya yang efektif dan efisien, misalnya dengan membuat SOP, *job description*, *training* dan *development system*.
- 3) Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara, hingga seleksi.
- 4) Melakukan seleksi, promosi, *transferring* dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu.
- 5) Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, ketrampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standar lembaga.
- 6) Bertanggungjawab terhadap absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.

- 7) Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlaku kontrak kerja.
- 8) Melakukan tindakan disiplin pada karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan.

g. Manajer Keuangan dan Umum

Tugas-tugas pokok:

- 1) Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lain yang bertugas merancang perencanaan umum keuangan BMT.
- 2) Mengambil keputusan penting terhadap investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
- 3) Melaporkan laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen pusat.
- 4) Membuat analisis laporan keuangan.
- 5) Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan keuangan.
- 6) Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan laporan keuangan dan laporan pembiayaan.

h. Manajer Pemasaran

Tugas-tugas pokok:

- 1) Menyusun draft rencana pemasaran berupa target *funding*, *lending* dan konfirmasi per cabang.
- 2) Rencana pengembangan produk, promosi dan distribusi berdasarkan pemetaan segmen dan potensi pasar.
- 3) Memimpin rapat koordinasi bulanan dengan marketing cabang.
- 4) Mengembangkan *database* pelanggan jasa keuangan untuk menyusun profil dan pengembangan pemasaran.
- 5) Mengembangkan strategi pemasaran.
- 6) Melaksanakan *survey*.
- 7) Sebagai koordinator dalam penagihan pembiayaan bermasalah.

i. Kepala Operasional Cabang

Tugas-tugas pokok:

- 1) Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
- 2) Menerima dan mempelajari keputusan/instruksi/memo dari kantor pusat.
- 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan/memo/intruksi kepada semua karyawan dan pihak yang berkepentingan.
- 4) Mengevaluasi hasil realisasi keputusan/memo/instruksi dan bila diperlukan melaporkan kepada kantor pusat.
- 5) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran BMT dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- 6) Bersama dengan kabag. operasional dan marketing memproyeksikan jumlah anggota yang dapat diraih untuk jangka panjang dan jangka pendek.
- 7) Menentukan sasaran investasi jangka panjang dan jangka pendek.
- 8) Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka panjang 5 (lima) tahun dan jangka pendek 1 (satu) tahun.
- 9) Mempresentasikan rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek kepada pihak yang berhak (badan pengurus, anggota BMT).

j. Administrasi Pembukuan

Tugas-tugas pokok:

- 1) Pembuatan laporan keuangan.
- 2) Membuat laporan keuangan harian meliputi neraca dan laba rugi.
- 3) Membuat laporan keuangan akhir bulan meliputi neraca, laba rugi, dan tagihan angsuran.
- 4) Menyediakan data-data yang dibutuhkan.
- 5) Serah terima uang dari brankas ke teller.
- 6) Pengeluaran uang pagi hari, pada saat jam kerja.
- 7) Penyimpanan uang pada saat jam kerja dan pada saat sore hari.

#### **D. Ruang Lingkup Usaha BMT Al-Hikmah Ungaran**

##### **1. Si Rela (Simpanan Sukarela Lancar)<sup>6</sup>**

Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela) merupakan simpanan syariah yang sangat terjangkau bagi anggota dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

###### **a. Persyaratan**

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP).
- 3) Mengisi aplikasi pembukaan rekening Si Rela.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok Rp.25.000,- dan simpanan wajib Rp.10.000,-

###### **b. Fitur**

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga.
- 2) Syarat pembukaan rekening yang sangat ringan.
- 3) Bagi hasil sesuai prinsip syari'ah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.
- 4) Memperoleh bagi hasil setiap bulan secara otomatis.
- 5) Layanan *pick up service*.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp.10.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp.10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara minimum Rp.10.000,-
- 9) Penyetoran dan penarikan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

##### **2. Simpel (Simpanan Pelajar)<sup>7</sup>**

Simpanan pelajar yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa yang menginginkan rekening simpanan yang terus tumbuh dan berkesempatan mengajukan beasiswa bagi pelajar berprestasi. Adapun fitur dan syarat-syaratnya antara lain:

###### **a. Persyaratan**

---

<sup>6</sup>Brosur Si Rela BMT Al-Hikmah Ungaran.

<sup>7</sup>Brosur Simpel BMT Al-Hikmah Ungaran.



- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening Simpel.
- 3) Menyerahkan fotocopy kartu pelajar/kartu mahasiswa.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok Rp.25.000,- dan simpanan wajib Rp.10.000,-

b. Fitur

- 1) Memperoleh bagi hasil simpanan otomatis yang ditambahkan setiap bulan.
- 2) Menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.
- 3) Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi.
- 4) Pembukaan rekening minimum Rp10.000,-
- 5) Setoran selanjutnya minimum Rp10.000,-
- 6) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp10.000,-
- 7) Penyetoran dan penarikan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

3. Si Haji (Simpanan Ibadah Haji dan Umroh)<sup>8</sup>

Si Haji atau Umroh merupakan simpanan haji atau umroh, sebuah inovasi baru di BMT Al-Hikmah Ungaran yang dikhususkan bagi anggota atau masyarakat muslim yang berencana melaksanakan ibadah haji atau umroh. Adapun syarat dan fiturnya sebagai berikut:

a. Persyaratan

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota Si Haji.
- 3) Mengisi aplikasi rekening simpanan Si Haji atau Umroh.
- 4) Menyerahkan fotocopy KTP.

b. Fitur

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*.

---

<sup>8</sup>Brosur Si Haji BMT Al-Hikmah Ungaran.

- 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri secara online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.
- 4) Tersedia fasilitas dana talangan haji/umroh sampai dengan Rp25.000.000,- dari BMT Al-Hikmah Ungaran.
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 6) Pembukaan rekening awal minimum Rp500.000,-
- 7) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya ibadah haji atau umroh.
- 8) Penarikan dapat dilaksanakan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap melaksanakan ibadah haji atau umroh.

#### 4. Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka)<sup>9</sup>

Simpanan sukarela berjangka yaitu simpanan dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi optimal bagi anggota BMT Al-Hikmah. Adapun syarat dan fiturnya sebagai berikut:

##### a. Persyaratan

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening Si Rela.
- 3) Melampirkan fotocopy identitas diri.

##### b. Fitur

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudhrabah mutlaqah*.
- 3) Pilihan jangka waktu yang fleksibel 6,12 dan 24 bulan.
- 4) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- 5) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian.
- 6) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis.
- 7) Setoran minimal Rp500.000,-
- 8) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT Al-Hikmah

---

<sup>9</sup>Brosur Si Suka BMT Al-Hikmah Ungaran.

## c. Daftar Nisbah Bagi Hasil Si Suka

Tabel 3.1

Nisbah Bagi Hasil Si Suka

Jangka Waktu	Nisbah BMT	Nisbah Anggota
6 Bulan	60%	40%
12 Bulan	50%	50%
24 Bulan	45%	55%

5. Si Suqur (Simpanan Sukarela Qurban)<sup>10</sup>

Si Suqur merupakan kepanjangan dari Simpanan Sukarela Qurban, ialah jenis simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin melakukan ibadah qurban atau aqiqah. Adapun syarat dan fiturnya sebagai berikut:

## a. Persyaratan

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi rekening Si Suqur.
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp10.000,-

## b. Fitur

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*.
- 5) Memperoleh bagi hasil secara otomatis setiap bulannya.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp25.000,-
- 7) Setoran berikutnya minimum Rp10.000,-
- 8) Saldo yang dipelihara minimum Rp10.000,-

---

<sup>10</sup>Brosur Si Suqur BMT Al-Hikmah Ungaran.

- 9) Hanya dapat diambil pada saat melaksanakan ibadah qurban atau aqiqah.

#### 6. Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah)<sup>11</sup>

Si Wadiah adalah kependekan dari simpanan wajib berhadiah dengan prosedur bonus yang diperoleh anggota akan diberikan dalam bentuk hadiah dengan cara diundi.

##### a. Persyaratan

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening Si Wadiah.
- 3) Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).
- 4) Setiap bulan menabung simpanan Si Wadiah sebesar Rp200.000,-.
- 5) Biaya pendaftaran sebesar Rp20.000,-.

##### b. Fitur

- 1) Jangka waktu menabung selama 24 bulan.
- 2) Pengundian hadiah dilaksanakan pada akhir periode (bulan ke 25).
- 3) Tiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari 1 kesempatan.
- 4) Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh (sesuai ketentuan Si Wadiah).

#### 7. Pembiayaan Multi Barang<sup>12</sup>

Pembiayaan multi barang yaitu pembiayaan dengan fasilitas yang ditujukan untuk anggota yang menginginkan barang atau peralatan untuk usaha guna mendukung usaha anggota, dengan menggunakan prinsip syariah yang berakadkan murabahah. BMT Al-Hikmah siap memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggota yang menginginkan barang impian dengan mudah dan cepat. Adapun persyaratan dan keunggulan pada pembiayaan multibarang yaitu:

##### a. Persyaratan

- 1) Bersedia menjadi anggota di BMT Al-Hikmah.

---

<sup>11</sup>Brosur Si Wadiah BMT Al-Hikmah Ungaran.

<sup>12</sup>Brosur Pembiayaan Multi Barang BMT Al-Hikmah Ungaran.

- 2) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- 3) Memiliki usaha tetap dan berpenghasilan.
- 4) Bersedia untuk di-*survey*.
- 5) Melengkapi persyaratan administratif berupa fotocopy identitas diri (KTP atau SIM) suami istri yang masih berlaku, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menyerahkan foto jaminan.

b. Keunggulan

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor Jepang (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki).
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat.
- 3) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- 4) Margin diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- 5) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan *dealer* atau *leasing*.

8. Pembiayaan Multi Usaha<sup>13</sup>

Pembiayaan mitra usaha yaitu fasilitas pembiayaan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usahanya, agar menjadi lebih besar dan menguntungkan. Pembiayaan mitra usaha ini memakai prinsip kerjasama *mudharabah* atau *musyarakah*. BMT Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut. Adapun syarat yang harus diperhatikan oleh anggota saat mengajukan pembiayaan mitra usaha, antara lain:

a. Persyaratan

- 1) Menjadi anggota BMT Al-Hikmah.
- 2) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 3) Memiliki usaha produktif dan prospektif.
- 4) Bersedia di-*survey* di lokasi usaha yang diajukan.

---

<sup>13</sup>Brosur Pembiayaan Multi Usaha BMT Al-Hikmah Ungaran.

- 5) Melengkapi persyaratan administratif, yaitu: fotocopy identitas diri (KTP atau SIM) suami dan istri yang masih berlaku, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy data pendukung usaha, fotocopy BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau surat kios atau los pasar.

b. Ketentuan Jaminan

- 1) Jaminan BPKB, yaitu: melampirkan fotocopy BPKB kendaraan yang dijamin, fotocopy STNK yang masih berlaku, foto kendaraan, cek fisik rangka dan nomer mesin kendaraan yang dijamin.
- 2) Jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik, yaitu: melampirkan fotocopy sertifikat tanah, surat pengantar dari kelurahan, melampirkan surat pajak (SPPT) yang asli. Apabila jaminan bukan hak milik sendiri perlu untuk melampirkan fotocopy KTP suami dan istri pemilik jaminan.
- 3) Sertifikat jaminan surat kios atau los pasar, yaitu: melampirkan fotocopy surat kios atau los pasar, surat pengantar izin dari kelurahan pasar. Apabila jaminan bukan hak milik sendiri perlu melampirkan fotocopy KTP suami dan istri pemilik jaminan.

9. Pembiayaan Multi Jasa<sup>14</sup>

Pembiayaan multi jasa yaitu fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. Pembiayaan multi jasa ini memakai prinsip akad *ijaroh*. BMT Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai dengan kesepakatan. Adapun syarat yang harus diperhatikan oleh anggota saat mengajukan pembiayaan multi jasa, antara lain:

a. Persyaratan

- 1) Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah.
- 2) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.

---

<sup>14</sup>Brosur Pembiayaan Multi Jasa BMT Al-Hikmah Ungaran.

- 3) Memiliki usaha atau penghasilan tetap.
  - 4) Bersedia untuk di-*survey* apabila pihak BMT Al-Hikmah memerlukan.
  - 5) Melengkapi persyaratan administratif, yaitu: fotocopy identitas diri (KTP atau SIM) suami dan istri yang masih berlaku, fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan fotocopy surat nikah.
- b. Ketentuan Jaminan
- 1) Jaminan BPKB, yaitu: melampirkan fotocopy BPKB kendaraan yang dijaminakan, fotocopy STNK yang masih berlaku, foto kendaraan, cek fisik rangka dan nomer mesin kendaraan yang dijaminakan.
  - 2) Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu: melampirkan fotocopy sertifikat tanah, surat pengantar dari kelurahan, melampirkan surat pajak (SPPT) yang asli. Apabila jaminan bukan hak milik sendiri perlu untuk melampirkan fotocopy KTP suami dan istri pemilik jaminan.
  - 3) Sertifikat jaminan surat kios atau los pasar, yaitu: melampirkan fotocopy surat kios atau los pasar, surat pengantar izin dari kelurahan pasar. Apabila jaminan bukan hak milik sendiri perlu untuk melampirkan fotocopy KTP suami dan istri pemilik jaminan.

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012**  
**TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA**  
**KEUANGAN SYARIAH PADA PRODUK SI WADIAH**  
**DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN**

Harus diakui, setiap BMT memiliki strategi marketing sebagai sepak terjang untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan eksistensi instansi. Hal ini tentu diupayakan agar visi dan misi BMT tercapai sehingga banyaknya anggota yang bergabung menjadi konsekuensi logis. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin lekat pula citra yang melambung.

Produk Si Wadiah ialah salah satu produk simpanan suka rela yang menjadi ciri khas BMT Al-Hikmah Ungaran. Sebagai salah satu strategi dalam menarik minat anggota baru, adanya produk Si Wadiah ini juga bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar gemar untuk menyimpan/ menabung dan tidak boros.<sup>1</sup> Sebagaimana kita tahu, sikap boros dilarang oleh Allah SWT dalam Q. S. Al-Isra' ayat 26.

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Menilik lebih dalam ayat di atas, tumpuan poinnya ialah anjuran untuk tidak mengeluarkan uang atau harta tidak pada tempatnya. Sebagai solusi, salah satunya dengan cara menabung. Selain uang terjamin aman sebagai tunjangan masa depan, juga jauh dari gaya hidup hedonisme.

Larangan bersikap boros pun Allah tegaskan kembali pada ayat berikutnya, yaitu Q. S. Al-Isra' ayat 27.

---

<sup>1</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara Muhari, Kepala Pusat BMT Al-Hikmah Ungaran, pada tanggal 26 April 2019.



إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Dengan adanya larangan bersikap boros tersebut, BMT Al-Hikmah Ungaran berupaya untuk memberikan jalur-jalur agar masyarakat senang menabung. Oleh karena itu, salah satu jalur tersebut adalah dengan mencanangkan produk Si Wadiah.

#### **A. Mekanisme Pemberian Hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran pada Produk Si Wadiah**

##### **1. Sumber Dana Pengadaan Hadiah**

Dana BMT adalah uang tunai yang dimiliki BMT ataupun aktiva lancar yang dikuasai BMT dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki BMT bukan hanya berasal dari BMT sendiri, namun uang tersebut juga dapat berasal dari pihak lain yang dititipkan pada BMT dan sewaktu-waktu akan diambilnya kembali.<sup>2</sup>

Sumber dana dalam pengadaan hadiah pada produk Si Wadiah ini berasal dari dana promosi yang dimiliki BMT Al-Hikmah Ungaran. Dana promosi ini berasal dari pendapatan BMT Al-Hikmah Ungaran yang disisihkan sekian persen setiap bulannya.<sup>3</sup>

##### **2. Akad yang Diterapkan**

Produk Simpanan Wajib Berhadiah ini menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*<sup>4</sup>, yaitu akad *wadi'ah* yang di dalamnya memperbolehkan pemanfaatan barang/harta yang dititipkan oleh pihak yang menerima titipan. Dalam hal memanfaatkan barang/harta tersebut, jika memperoleh hasil berupa keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi milik

---

<sup>2</sup>Unggul Priyadi dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018, h. 72

<sup>3</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara Muhari, Kepala Pusat BMT Al-Hikmah Ungaran, pada tanggal 26 April 2019.

<sup>4</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara Muhari, Kepala Pusat BMT Al-Hikmah Ungaran, pada tanggal 26 April 2019.

penerima titipan. Namun, penerima titipan juga boleh memberikan bonus kepada pemilik barang/harta sebagai ucapan terima kasih dengan nominal yang tidak diperjanjikan di awal akad.

Oleh karena produk Si Wadiah menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*, maka yang diberikan BMT Al-Hikmah Ungaran kepada anggota produk Si Wadiah yaitu berupa bonus yang tidak ditentukan persentasenya. Selain itu, bonus tersebut tidak diberikan setiap bulan, melainkan akan diberikan pada bulan ke-25 dalam bentuk hadiah yang dibagikan dengan cara diundi.

### 3. Mekanisme Pemberian Hadiah

Mekanisme pemberian hadiah produk Si Wadiah adalah sebagai berikut.

- a. Calon anggota mendaftarkan diri menjadi anggota BMT Al-Hikmah Ungaran dengan cara membuka tabungan Si Rela (Simpanan Sukarela Lancar). Syarat yang diperlukan yaitu menyertakan fotokopi kartu identitas diri dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- b. Calon anggota membayar biaya pendaftaran Si Wadiah sebesar Rp20.000,-.
- c. Pihak BMT Al-Hikmah Ungaran membukakan tabungan Si Wadiah.
- d. Anggota tabungan Si Wadiah dibagi dalam kelompok-kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 100 anggota. Tiap anggota hanya dapat mulai menabung jika dalam kelompok tersebut sudah genap 100 orang, sehingga waktu penyetoran simpanan dimulai serentak pada bulan yang sama.
- e. Tiap anggota dalam kelompok wajib menabung tiap bulan minimal Rp200.000,- selama 24 bulan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertulis di dalam brosur. Jangka waktu penyetoran adalah maksimal tanggal 10.
- f. Tiap anggota dalam kelompok mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengundian hadiah. Semua anggota dalam kelompok yang memenuhi persyaratan akan diikutsertakan dalam pengundian. Syarat

tersebut terkait dengan batas penyetoran simpanan yaitu maksimal tanggal 10.

- g. Jika ada salah satu atau beberapa anggota yang tidak dapat menabung selama 24 kali, maka anggota tersebut tidak dapat mengikuti undian pada bulan ke-25. Namun dapat mengikuti undian pada periode berikutnya bergabung dengan kelompok selanjutnya.
- h. Tiap anggota dalam 1 kelompok dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh (sesuai ketentuan Si Wadiah).
- i. Penentuan nomor undian sesuai dengan nomor yang tertera di buku tabungan Si Wadiah, yaitu nomor rekening tabungan.
- j. Sebelum undian dilakukan, pihak BMT menuliskan daftar hadiah yang akan diundi di papan tulis berwarna putih.
- k. Cara pengundian yang diterapkan di BMT Al-Hikmah Ungaran menggunakan cara manual, yaitu dengan toples berisi potongan kertas yang bertuliskan nomor anggota Si Wadiah.
- l. Sebelum dilakukan pengundian, pihak BMT menyebutkan terlebih dahulu jenis hadiah yang akan diundi. Contoh, “pengundian untuk hadiah setrika.”
- m. Setelah salah satu pihak mengambil potongan kertas yang berisi nomor anggota Si Wadiah, kemudian pihak BMT mengumumkan nomor yang muncul tersebut.
- n. Anggota yang memiliki nomor anggota Si Wadiah sesuai dengan yang dibacakan maka dipersilahkan untuk maju dan menerima hadiah yang diundi dengan syarat menunjukkan buku tabungan Si Wadiah dan kartu identitas diri.
- o. Selanjutnya, pihak BMT menuliskan nomor anggota yang mendapatkan hadiah pada papan tulis berwarna putih sejajar dengan nama hadiah yang didapatkan.
- p. Tiap anggota akan mendapatkan 1 unit hadiah yang berjumlah 100 hadiah sesuai dengan undian, kecuali pemenang *grand prize* sepeda

motor. Hal ini dikarenakan *grand prize* sepeda motor tidak termasuk dalam hadiah yang berjumlah 100 unit tersebut.

4. Daftar Jumlah Penerima Undian Berhadiah Produk Si Wadiah BMT Al-Hikmah Ungaran Tahun 2017 sampai dengan 2019.

Tabel 4.1

Jumlah Penerima Hadiah Si Wadiah

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerima</b>
2017	1 kelompok (100 anggota)
2018	3 kelompok (300 anggota)
2019	1 kelompok (100 anggota)

5. Daftar Hadiah Periode 2019

Tabel 4.2

Daftar Hadiah *Grand Prize* Si Wadiah Tahun 2019

<b><i>Grand Prize</i></b>	<b>Unit</b>
Sepeda Motor	1

Tabel 4.3

Daftar Hadiah Umum Si Wadiah Tahun 2019

<b>Hadiah</b>	<b>Unit</b>
Mesin Cuci	1
Lemari Es	1
<i>Handphone</i>	1
Si Rela @ Rp500.000,-	3
Kipas Angin	6
Kompor Gas 2 Tungku	6
Blender	9
Sprei Cantik	9
Lampu Emergency	21

Bingkisan Menarik	43
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

**B. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran**

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat, termasuk hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah fatwa tentang pemberian hadiah atas produk penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa pemberian hadiah bertujuan untuk membuat anggota loyal kepada LKS, sehingga diperbolehkan dengan tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pemberian hadiah dengan cara pengundian diberikan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran atas produk penghimpunan dana, yaitu produk Si Wadiah. Si Wadiah adalah produk penghimpunan dana (*funding*) berupa simpanan wajib yang disetorkan setiap bulan selama 24 kali. Besarnya simpanan untuk produk ini yaitu minimal Rp200.000,- dengan batas waktu maksimal tanggal 10 di setiap bulannya. Apabila terdapat 1 anggota yang tidak genap menabung selama 24 bulan, anggota tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam pengundian hadiah pada bulan ke-25. Namun anggota tersebut tetap dapat mengikuti undian jika tabungannya sudah genap 24 bulan dan diundi bersama dengan kelompok berikutnya.

Produk Si Wadiah ini menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*, sehingga anggota produk Si Wadiah tidak menerima bagi hasil setiap bulan, akan tetapi yang diterima adalah bonus dari BMT Al-Hikmah Ungaran sebagai ucapan terima kasih. Bonus tersebut akan dibagikan kepada anggota dalam bentuk hadiah dengan cara pengundian. Seluruh anggota dalam kelompok yang terdaftar akan mendapatkan hadiah sesuai dengan undian.

Tidak ada anggota yang tidak mendapatkan hadiah. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Muhari, S. E. selaku Kepala Pusat BMT Al-Hikmah Ungaran dalam wawancara pada tanggal 26 April 2019, bahwa semua anggota kelompok yang mengikuti pengundian mendapatkan kesempatan yang sama.

Hadiah yang diberikan dengan cara pengundian oleh pihak BMT Al-Hikmah Ungaran merupakan bentuk promosi, di samping itu hadiah tersebut juga merupakan bentuk bonus atas DPK (Dana Pihak Ketiga). Hal ini dikarenakan saldo yang mengendap di tabungan anggota Si Wadiah selama 2 tahun, dan saldo simpanan tersebut adalah DPK. Seharusnya hadiah tersebut tidak diperjanjikan, akan tetapi pada praktiknya hadiah tersebut dicantumkan dalam brosur, dan dijadikan sebagai strategi pemasaran.

Tabel 4.4  
Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

No.	Segi	Isi Fatwa	Praktik di Lapangan
1.	Wujud Hadiah	a. Dalam bentuk barang/jasa, tidak dalam bentuk uang. b. Berwujud <i>haqiqiy</i> atau <i>hukmiy</i> . c. <i>Mubah</i> (boleh).	a. Tidak semua hadiah dalam bentuk barang, karena ada hadiah yang berupa tabungan Si Rela masing-masing senilai Rp500.000,- untuk 3 orang anggota. b. Hadiah berwujud <i>haqiqiy</i> . c. Hadiah berupa <i>grand prize</i> sepeda motor, mesin cuci, lemari es, <i>handphone</i> , tabungan Si Rela Rp500.000,- kipas angin, kompor gas 2 tungku, blender, spreng cantik, lampu <i>emergency</i> , bingkisan menarik.
2.	Sumber Dana	Hadiah yang diberikan harus milik LKS, bukan milik nasabah.	Keuntungan (laba) BMT Al-Hikmah Ungaran yang disisihkan sekian persen setiap bulan sebagai dana promosi untuk pembelian hadiah.
3.	Waktu	Dalam akad <i>wadi'ah</i> , hadiah diberikan sebelum	Hadiah diberikan pada tahun ke-25 dengan cara

		terjadinya akad tersebut.	pengundian.
4.	Penentuan Penerima Hadiah	<p>a. LKS berhak menetapkan syarat-syarat selama tidak menjurus kepada praktik riba.</p> <p>b. Penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang didapatkan jika ingkar dengan syarat yang telah ditentukan LKS.</p> <p>c. Diatur dalam peraturan internal LKS dalam pertimbangan DPS.</p> <p>d. Ada pengawasan dari pihak otoritas terhadap kebijakan pemberian hadiah beserta operasionalnya.</p>	<p>a. Syarat anggota Si Wadiah yaitu memiliki tabungan Si Rela dan membuka tabungan Si Wadiah, menyetorkan simpanan minimal Rp200.000,-/bulan selama 24 bulan, disetorkan maksimal tanggal 10, saldo tidak dapat diambil sampai bulan ke-25 (waktu pengundian).</p> <p>b. Hadiah harus dikembalikan jika diketahui adanya kecurangan.</p> <p>c. Produk Si Wadiah diatur dalam peraturan internal BMT Al-Hikmah Ungaran.</p> <p>d. Pelaksanaan pemberian hadiah diawasi oleh pihak otoritas, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).</p>
5.	Cara	Boleh dilakukan secara langsung, dan boleh dilakukan dengan cara pengundian ( <i>qur'ah</i> ).	Pemberian hadiah dilakukan dengan cara pengundian.
6.	Tujuan	a. Tidak bersifat	a. Selain sebagai salah satu



	Pemberian Hadiah	<p>memberikan keuntungan secara pribadi pejabat perusahaan/institusi penyimpan dana.</p> <p>b. Tidak berpotensi praktik suap.</p> <p>c. Tidak menjurus kepada riba terselubung.</p> <p>d. Harus terhindar dari <i>qimar (maysir)</i>, <i>gharar</i>, <i>riba</i>, dan <i>akl al-mal bil batil</i>.</p>	<p>strategi promosi dan citra khas BMT Al-Hikmah Ungaran, adanya produk Si Wadiah ini bertujuan untuk memotivasi anggota agar gemar menabung dan tidak bersikap boros.</p> <p>b. Tidak terdapat praktik suap.</p> <p>c. Biaya pendaftaran sebesar Rp20.000,- dialokasikan untuk pembuatan buku tabungan dan <i>snack</i>/jajanan pada saat pengundian hadiah.</p> <p>d. Tidak terdapat maysir, karena pengundian dilakukan dengan prinsip keadilan (semua anggota mendapat kesempatan yang sama), dan bukan merupakan judi.</p>
7.	Syarat dan Ketentuan Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga	<p>a. Hadiah tidak diperjanjikan.</p> <p>b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung.</p> <p>c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan/urf).</p>	<p>a. Hadiah tercantum dalam brosur.</p> <p>b. Hadiah yang diberikan BMT Al-Hikmah Ungaran diperjanjikan di awal akad.</p> <p>c. Undian dilakukan setiap tahun pada bulan ke-25 (akhir periode).</p>

Penjelasan dari tabel di atas yaitu sebagai berikut.

1. Ketentuan terkait Pihak yang Berjanji (*Wa'id*)

a. Bentuk dan Wujud Hadiah

Hadiah yang diberikan kepada anggota BMT Al-Hikmah Ungaran atas produk Si Wadiah terdiri dari *grand prize* 1 unit sepeda motor, 1 unit mesin cuci, 1 unit lemari es, 1 unit *handphone*, 3 tabungan Si Rela masing-masing senilai Rp500.000,-, 6 unit kipas angin, 6 unit kompor gas 2 tungku, 9 blender, 9 sprei cantik, 21 lampu *emergency*, dan 43 bingkisan menarik. Dari beberapa hadiah tersebut terdapat hadiah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, yaitu hadiah tabungan Si Rela senilai Rp500.000,- karena yang termaktub dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan hadiah dalam bentuk uang. Berdasarkan hal ini, BMT Al-Hikmah Ungaran belum mengimplementasikan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tepatnya pada ketentuan terkait hadiah poin *a*, “Hadiah promosi diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak dalam bentuk uang.”

Namun, selain hadiah tabungan Si Rela, terdapat beberapa hadiah yang berbentuk barang, yaitu 1 unit sepeda motor sebagai *grand prize*, mesin cuci, lemari es, *handphone*, kipas angin, kompor gas 2 tungku, blender, sprei, dan beberapa bingkisan menarik. Hadiah-hadiah berupa barang tersebut berwujud secara fisik dan hukum. Berdasarkan hal tersebut, BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 poin *b*, yang berbunyi “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang berwujud, baik *haqiqiy* maupun wujud *hukmiy*.”

Selain itu, hadiah-hadiah yang diberikan BMT Al-Hikmah Ungaran termasuk barang-barang yang dibolehkan syariat Islam, karena barang-barang tersebut halal, bermanfaat dan tidak menimbulkan *madharat*, sehingga barang-barang tersebut bukan merupakan barang-

barang yang *subhat* (di tengah-tengah). Berdasarkan hal ini, BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplemnetasikan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 poin *c*, yang berbunyi, “Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal.”

b. Sumber Dana

Berkaitan dengan sumber dana, hadiah atas produk Si Wadiah dibeli dengan dana promosi yang dimiliki oleh BMT Al-Hikmah Ungaran. Dana promosi tersebut berasal dari keuntungan BMT Al-Hikmah Ungaran yang disisihkan sekian persen setiap bulan. Terbukti, sumber dana hadiah bukan milik nasabah. Jadi, dalam hal ini BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin *d* yang berbunyi, “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.”

c. Waktu

Hadiah produk Si Wadiah diberikan pada akhir periode akad, yaitu pada bulan ke-25. Dikatakan akhir periode karena anggota diwajibkan menabung selama 24 kali dalam 24 bulan dan tidak boleh diambil. Pengundian hadiah dilakukan pada bulan ke-25, setelah itu dana nasabah baru bisa diambil. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam fatwa, bahwa hadiah diberikan sebelum terjadinya akad *wadi'ah*. Berdasarkan hal ini, BMT Al-Hikmah Ungaran belum mengimplementasikan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 poin *e* yang berbunyi, “Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.”

#### d. Syarat Penerima Hadiah

Anggota Si Wadiah yang berhak mengikuti undian memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran. Syarat dan ketentuan tersebut yaitu:

- 1) Terdaftar sebagai anggota BMT Al-Hikmah Ungaran. Jika belum terdaftar maka calon anggota mendaftar terlebih dahulu dengan cara membuka tabungan Si Rela (Simpanan Suka Rela Lancar).
- 2) Biaya pendaftaran Rp20.000,- dengan simpanan awal Rp200.000,- sebagai simpanan bulan pertama.
- 3) Setiap anggota dibolehkan mendaftar lebih dari satu kali. Artinya, jika anggota telah menyelesaikan simpanan selama 24 bulan dan telah mengikuti pengundian hadiah, anggota dibolehkan untuk mendaftar pada kelompok berikutnya.
- 4) Jangka waktu penyetoran selama 24 bulan. Saldo simpanan tidak dapat diambil sebelum jangka waktu selesai.
- 5) Pengundian hadiah dilaksanakan pada akhir periode (bulan ke-25).
- 6) Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh.

Berdasarkan keterangan di atas, syarat dan ketentuan yang ditetapkan BMT Al-Hikmah Ungaran kepada anggota atas produk Si Wadiah tidak terindikasi adanya riba. Biaya pendaftaran sebesar Rp20.000,- tersebut bukan merupakan iuran yang dibayar anggota sebagai syarat mengikuti undian hadiah. Namun, biaya tersebut dialokasikan untuk buku tabungan Si Wadiah yang diserahkan kepada anggota di awal akad, dan *snack*/jajanan yang akan didapatkan pada waktu pengundian hadiah. Berdasarkan hal ini, BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin *f*, yang berbunyi, “LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba”.

Meskipun dalam syarat dan ketentuan—sebagaimana yang telah disebutkan di atas—tidak tertulis bahwa anggota harus mengembalikan hadiah yang didapatkan jika ingkar terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur BMT, tetapi hal tersebut secara otomatis berlaku pada BMT Al-Hikmah Ungaran, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhari, Kepala Pusat BMT Al-Hikmah Ungaran dalam wawancara pada tanggal 26 April 2019:

Merupakan sebuah konsekuensi jika terdapat anggota yang ingkar terhadap peraturan, ia dapat dikenai sanksi, dalam hal ini yaitu pengembalian hadiah.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 yang berbunyi “Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya.”

e. Peraturan Internal LKS

Selanjutnya yaitu mengenai peraturan internal BMT Al-Hikmah Ungaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhari selaku Kepala Pusat BMT Al-Hikmah Ungaran, produk Si Wadiah diatur dalam peraturan internal BMT Al-Hikmah Ungaran. Oleh sebab itu, BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin *h*, “Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah”.

f. Pengawasan Pihak Otoritas

Dalam pelaksanaan pemberian hadiah produk Si Wadiah terdapat pengawasan dari pihak otoritas, adapun pihak otoritas yang dimaksud dalam hal ini ialah Dewan Pengawas Syariah. DPS (Dewan Pengawas Syariah) selalu melakukan audit terhadap pelaksanaan produk-produk

---

<sup>5</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara Muhari, Kepala Pusat BMT Al-Hikmah Ungaran, pada tanggal 26 April 2019.

yang ada di BMT Al-Hikmah Ungaran setiap akhir bulan, termasuk Si Wadiah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS tidak hanya pada saat pemberian hadiah, tetapi juga pengawasan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin *i*, “Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada Nasabah, berikut operasionalnya”.

## 2. Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

### a. Tujuan Pemberian Hadiah

Tujuan pemberian hadiah pada produk Si Wadiah ini adalah sebagai salah satu strategi pemasaran BMT Al-Hikmah Ungaran dalam menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota BMT Al-Hikmah. Tujuan pemberian hadiah tidak memberikan keuntungan secara pribadi kepada pejabat/pihak BMT Al-Hikmah Ungaran. Tujuan ini murni demi terlaksananya visi dan misi BMT Al-Hikmah Ungaran.

Selain itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhari, S. E. dalam wawancara pada tanggal 26 April 2016, bahwa salah satu tujuan adanya produk Si Wadiah adalah untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar gemar menabung dan tidak bersikap boros. Sikap boros sangat tidak disukai oleh Allah sebagaimana dalam Q. S. Al-Isra’ ayat 26 dan 27,

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Berdasarkan dua ayat tersebut, Allah melarang bersikap boros secara tegas, dan barangsiapa bersikap boros dia adalah teman setan. Hemat penulis, BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin *a* angka (1) “Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana.”

Tujuan pemberian hadiah pada produk Si Wadiah tidak mengandung suap. Dikatakan suap adalah jika hadiah diberikan dari bawahan kepada atasan dengan maksud dan tujuan tertentu. Misal, seorang mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen dengan maksud agar diberi nilai yang baik dalam ujian oleh dosen tersebut. Hal ini dikatakan suap. Kecuali apabila mahasiswa terbiasa memberikan hadiah kepada dosen sejak sebelum adanya perkara (ujian), dan pemberian hadiah tersebut murni karena kebiasaan sebelumnya, dengan tanpa maksud dan tujuan tertentu.

Maka dari itu, hadiah yang diberikan pihak BMT Al-Hikmah Ungaran kepada anggota Si Wadiah bukan kategori suap. Jadi, BMT Al-Hikmah telah mengimplementasikan ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin *a* angka (2) yang berbunyi, “Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal berpotensi praktik *risywah* (suap)”.

Dalam praktik di lapangan, tidak terdapat unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. BMT Al-Hikmah Ungaran tidak memungut biaya tambahan apapun dari anggota. Biaya yang dibebankan kepada anggota

hanya biaya pendaftaran, selain itu anggota hanya perlu menabung tiap bulan minimal sebesar Rp200.000,- yang dilakukan maksimal setiap tanggal 10 di setiap bulannya. Apabila anggota tidak menabung genap 24 bulan, maka anggota tidak dapat mengikuti undian pada bulan ke-25, kecuali anggota melengkapinya. Simpanan anggota yang ditabung selama 24 bulan tidak akan berkurang sepeserpun, karena pembelian hadiah tidak diambil dari dana simpanan anggota. Hal ini sudah jelas, sehingga tidak ada unsur *gharar* di dalamnya.

Selain itu, dalam mekanisme pemberian hadiah yang dilakukan BMT Al-Hikmah Ungaran dengan cara pengundian tidak terdapat unsur *maysir*. Undian yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran bukanlah judi, karena anggota tidak mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan hadiah yang diundi. Dana tabungan anggota tetap aman tanpa berkurang sedikitpun. Dikatakan judi adalah apabila anggota memperoleh hadiah dengan tanpa usaha apapun.

Dalam produk Si Wadiah terdapat usaha dari anggota, yaitu dengan cara menabung secara berkala selama 24 bulan dan tidak mengambil tabungannya sebelum akad selesai, sehingga Si Wadiah tidak dikategorikan sebagai judi. Dengan demikian, BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dalam poin *a* angka (3) “Menjurus kepada riba terselubung,” dan poin *b*, “Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maysir*), *gharar*, riba, dan *akl al-mal bil batil*.”

#### b. Cara Pemberian Hadiah

Pemberian hadiah atas produk Si Wadiah dilakukan dengan cara pengundian, sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Berdasarkan hal ini, BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin *c*, “Pemberian hadiah promosi oleh LKS



boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*)”.

### 3. Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga

Hadiah undian yang akan diberikan BMT Al-Hikmah Ungaran tertulis dengan jelas dalam brosur produk Si Wadiah, hal ini berarti hadiah tersebut telah dijanjikan oleh BMT kepada anggota. Selain itu, dalam cara dan ketentuan yang tertera pada brosur juga terdapat kalimat bahwa “Semua anggota dipastikan akan mendapat hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh”. Dalam hal ini, BMT Al-Hikmah Ungaran belum mengimplementasikan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin *a*, “Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.”

Sebagaimana yang telah diketahui, produk Si Wadiah merupakan salah satu produk penghimpunan dana di BMT Al-Hikmah Ungaran yang menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam penghimpunan dana, jika LKS memberikan hadiah yang diperjanjikan kepada nasabah maka hadiah tersebut termasuk kategori riba. Larangan ini termaktub dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 255 berikut ini:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q. S. Al-Baqarah/2: 275).

Oleh karena itu, dalam akad *wadi'ah* LKS tidak boleh memberikan tambahan apapun yang diperjanjikan di awal. Namun, LKS boleh memberikan hadiah kepada nasabah jika tidak diperjanjikan di awal akad.

Berdasarkan dengan hal tersebut, hadiah yang diberikan BMT Al-Hikmah Ungaran kepada anggota tergolong riba. Hal ini dikarenakan hadiah tersebut diperjanjikan di awal akad, bahkan tertulis dalam brosur. Berkaitan dengan hal ini, BMT Al-Hikmah Ungaran belum mengimplementasikan ketentuan hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-

MUI/XII/2012 pada poin *b* yang berbunyi, “Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung.”

Produk Simpanan Wajib Berhadiah ini dilakukan setiap tahun ketika ada kelompok yang telah genap 100 orang. Pengundiannya pun dilakukan setiap bulan ke-25. Dalam hal ini terjadi kelaziman atau *urf*. *Urf* adalah kepatutan yang berlaku di masyarakat.<sup>6</sup> Fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tidak memperkenankan pemberian hadiah menjadi kelaziman atau *urf*. Hal ini didasari oleh kekhawatiran akan terjadinya perubahan niat nasabah/anggota dalam menabung. Perubahan niat yang dimaksud adalah dari niat ingin menyimpan uang supaya tidak boros, menjadi niat ingin mendapatkan hadiah.

Berdasarkan hal tersebut, BMT Al-Hikmah Ungaran belum mengimplementasikan ketentuan hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin *c*, yang berbunyi “Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan/ *urf*)”.

Menilik uraian di atas, ada beberapa ketentuan yang telah diimplementasikan BMT Al-Hikmah Ungaran. Namun di sisi lain, ada pula beberapa ketentuan yang belum dapat diimplementasikan dalam BMT Al-Hikmah Ungaran. Maka dari itu, dapat diketahui secara matematis bahwa terdapat 33% ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 yang belum diimplementasikan oleh pihak BMT Al-Hikmah Ungaran, dan terdapat 67% ketentuan yang sudah diimplementasikan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 228.

<sup>7</sup>Persentase tersebut didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah ketentuan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terkait pihak yang berjanji (*wa'id*) terdapat 9 (sembilan) poin, 7 (tujuh) poin sudah diimplementasikan dan 2 (dua) poin belum diimplementasikan, ketentuan terkait cara penentuan hadiah terdapat 3 (tiga) poin dan ketiga poin tersebut sudah diimplementasikan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran, ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) terdapat 3 (tiga) poin, ketiga poin tersebut belum diimplementasikan. Jadi, total ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 ada 15 poin, 10 (sepuluh) poin sudah diimplementasikan, dan 5 (lima) poin belum diimplementasikan. Sehingga dapat dihitung  $10/15 \times 100\% = 66,7\%$  kemudian dibulatkan menjadi 67%, dan  $5/15 \times 100\% = 33,3\%$  kemudian dibulatkan menjadi 33%.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pertama, mekanisme pemberian hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran atas produk Si Wadiah menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam akad ini, tidak terdapat ketentuan *nisbah* yang akan didapatkan anggota. Namun, BMT Al-Hikmah Ungaran boleh memberikan bonus kepada anggota sebagai ucapan terimakasih. Bonus tersebut dihadirkan dalam bentuk hadiah yang dibagikan kepada anggota Si Wadiah dengan cara pengundian.

Ada beberapa syarat menjadi anggota Si Wadiah, yaitu: terdaftar sebagai anggota BMT Al-Hikmah Ungaran. Keanggotaan ditandai dengan pembukaan tabungan Si Rela. Selanjutnya, anggota membayar biaya pendaftaran sebesar Rp20.000,- dan simpanan awal sebesar Rp200.000,-. Anggota diwajibkan untuk menabung minimal Rp200.000,- setiap bulan selama 24 bulan. Pengundian hadiah akan dilakukan pada bulan ke-25, sebelum pengundian hadiah dilakukan dana simpanan anggota tidak dapat diambil.

Si Wadiah dilaksanakan berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 100 anggota. Setiap anggota dapat mengikuti pengundian hadiah jika telah genap menabung selama 24 bulan. Jika terdapat satu atau lebih anggota yang belum genap menabung selama 24 bulan, maka akan mengikuti pengundian hadiah bersama kelompok berikutnya. Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh.

Hadiah yang akan dibagikan kepada anggota dibeli dengan dana promosi milik BMT Al-Hikmah Ungaran, yaitu dana yang diperoleh dari keuntungan BMT dan disisihkan sekian persen setiap bulan. Hadiah-hadiah tersebut berupa 1 unit sepeda motor sebagai *grand prize*, 1 unit mesin cuci, 1 unit lemari es, 1 unit *handphone*, 3 tabungan Si Rela masing-masing senilai Rp500.000,-, 6 unit kipas angin, 6 unit kompor gas 2 tungku, 9 unit blender, 9 sprei cantik, 21 lampu *emergency*, 43 bingkisan menarik.

Kedua, secara keseluruhan, BMT Al-Hikmah Ungaran untuk saat ini dapat dikatakan hampir mengimplementasikan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Mengacu pada praktik di lapangan terdapat beberapa hal yang menyebabkan BMT Al-Hikmah Ungaran belum 100% mengimplementasikan fatwa tersebut. Hal ini terbukti dengan salah satu hadiah yang berupa uang, yaitu tabungan Si Rela untuk 3 anggota masing-masing senilai Rp500.000,-.

Selain itu, waktu pemberian hadiah tidak sesuai dengan yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Sebab, praktik pemberian hadiah dilakukan pada akhir periode (bulan ke-25). Berikutnya, ketentuan pemberian hadiah seharusnya tidak dijanjikan di awal akad. Namun, pada brosur produk Si Wadiah tertulis dengan jelas, bahwa “Semua anggota dipastikan akan mendapat hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh.” Oleh sebab itu, hadiah yang diberikan BMT Al-Hikmah Ungaran termasuk kategori riba.

Selanjutnya, praktik pemberian hadiah atas produk Si Wadiah dilakukan setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya kelaziman atau *‘urf*, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah terdapat larangan tersebut.

Selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Secara matematis, BMT Al-Hikmah Ungaran telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 senilai 67% dan belum mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut senilai 33%. Hal ini dikarenakan terdapat hadiah dalam bentuk uang, pemberian hadiah dilakukan di akhir akad *wadi’ah*, hadiah diperjanjikan sehingga termasuk kategori riba, dan menjadi kelaziman (*‘urf*).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. BMT Al-Hikmah Ungaran hendaknya lebih memperhatikan ketentuan syariah yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, yaitu ketentuan terkait hadiah yang tidak diperbolehkan dalam bentuk uang, serta waktu pemberian hadiah yang dilakukan di akhir akad. Selain itu, jika memungkinkan, sebaiknya hadiah tidak diperjanjikan di awal akad agar hadiah tersebut tidak termasuk kategori riba. Selanjutnya, alangkah baiknya jika pemberian hadiah pada produk Si Wadiah tidak dilaksanakan setiap tahun, sehingga tidak menjadi kelaziman atau *'urf*. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perubahan niat nasabah/anggota, dari niat menabung menjadi niat ingin mendapatkan hadiah.
2. Anggota dan calon anggota hendaknya memahami betul apa yang telah menjadi ketentuan produk Si Wadiah, meneliti dan jeli dengan adanya pelaksanaan pemberian hadiah dengan cara pengundian. Anggota juga diharapkan untuk tertib dalam memenuhi syarat sebagaimana yang telah menjadi ketentuan dalam produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syarwani, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Digital Library, al-Maktabah Al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), dalam Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, cet. 2.
- Al-Qardhawi, Yusuf 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi*, Ed. 3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, cet. 3.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah MUI*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- FORDEBI & ADESy, *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Hidayat, Rachmat Taufik, dkk, *Almanak Alam Islami*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2000, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa>.
- Januari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, ed. 5, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, cet. 10.
- Kusumawati, L. *Gambaran Umum BMT Al-Hikmah Ungaran*, diakses pada tanggal 10 April 2019.
- Lindasari, Ima Nur, "Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di KSPSS BMT Al-Hikmah Ungaran Kantor Cabang Gunungpati II", Tugas Akhir, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Martono, Nanang, dkk. *Kematian Sekolah Swasta*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

- Maryati, Kun dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*, Jakarta: Esis, 2007, cet. 9.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, cet. 2.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, cet. 2.
- Mufidah, Zahrotul "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran", Tugas Akhir, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Muhari, Kepala Pusat BMT Al-Hikmah Ungaran, sumber data wawancara pada tanggal 26 April 2019.
- Muhsin, Abdullah Bin Abd. *Suap dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Nisa, Ika Syarifatun, "Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Nisak, Khoirun dan Irham Zaki, "Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan", Jurnal, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2017.
- Priyadi, Unggul dan Sutardi. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

Rosi Sarwo Edi, Fandi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Sa'adah, Aini Kholifatus, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) pada BMT Al-Hikmah", Tugas Akhir, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.

Shofyana, Lina. "*Pelaksanaan Program Undian Berhadiah di BPRS PNM Binama Semarang Ditinjau dari Fatwa DSN*", Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

Zulfa, Firda. *Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim*, Vol. 1, Desember 2015.

Brosur BMT Al-Hikmah Ungaran.

Dokumen BMT Al-Hikmah Ungaran.

Dokumen RAT (Rapat Anggota Tahunan) BMT Al-Hikmah Ungaran.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Profil MUI dalam <https://www.mui.or.id>.

<https://dsnemui.or.id>.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto pada saat melakukan wawancara dengan Kepala Pusat BMT Al-Hikmah Ungaran, Bapak Muhari, S. Ag.

brsur Produk Si Wadiah BMT Al-Hikmah Ungaran.

**DAFTAR SEGERA !!!  
DAPATKAN HADIAH MENARIK**

- 1 Mesin Cuci
- 1 Lemari Es
- 1 Handphone
- 3 Si Reli @Rp. 500.000,-
- 6 Kipas Angin
- 6 Kompor Gas 2 Tungku
- 9 Blender
- 9 Sprei Cantik
- 21 Lampu Emergency
- 43 Bingkisan Menarik → *rantang*



**CARANYA MUDAH**

- Setiap bulan menyeter simpanan SI WADIAH sebesar Rp. 200.000,-
- Tiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari 1 kesempatan.
- Jangka Waktu penyeteroran selama 24 Bulan.
- Pengundian hadiah dilaksanakan pada akhir periode (bulan ke-25)
- Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh (sesuai ketentuan si wadiah)
- Menjadi Anggota BMT Al Hikmah
- Pendaftaran Rp. 20.000


NB : Hadiah Setiap saat bisa berubah disesuaikan dengan kondisi terkini

**BMT<sup>K S P P S</sup> AL HIKMAH**  
UNGARAN - KAB. SEMARANG

Kantor Pusat :  
Jl. Jenderal Sudirman No. 12 II/2,  
Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519 Telp/Fax 024-6924415  
E-mail : bmtalikhmahsmge@yahoo.co.id

**SI WADIAH**  
SIMPANAN  
WAJIB BERHADIAH

*Pendaftaran 20.000  
100.000*



**GRAND PRIZE  
SEPEDA  
MOTOR**

Hubungi :

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA  
PIHAK BMT AL-HIKMAH UNGARAN**

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Apa jabatan Bapak/Ibu di BMT Al-Hikmah Ungaran?
3. Bagaimana sejarah BMT Al-Hikmah Ungaran?
4. Apa visi dan misi BMT Al-Hikmah Ungaran?
5. Bagaimana struktur organisasi BMT Al-Hikmah Ungaran?
6. Apa saja produk BMT Al-Hikmah Ungaran?
7. Apa saja persyaratan untuk mengajukan simpanan wajib berhadiah (Si Wadiah) di BMT Al-Hikmah Ungaran?
8. Apa alasan logis mengenai undian berhadiah selain menarik minat anggota baru?
9. Apa akad yang diterapkan dalam produk Si Wadiah?
10. Kapan waktu pelaksanaan menabung bagi anggota Si Wadiah?
11. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah pada produk Si Wadiah dimulai dari pengumpulan dana, pembelian hadiah, hingga pembagian hadiah kepada anggota?
12. Apakah hadiah dibeli dengan menyesuaikan dana atau sudah ada target hadiah tertentu?
  - a. Jika menyesuaikan dana, tentunya hadiah setiap tahun berbeda. Apakah hadiah yang diberikan hanya sebatas pengguguran janji BMT Al-Hikmah kepada anggota?
  - b. Jika sudah ada target hadiah tertentu, pernahkah terjadi kekurangan dana dalam pembelian hadiah?
13. Apakah BMT Al-Hikmah Ungaran mempunyai skema solusi semisal terdapat salah satu atau beberapa anggota yang tidak dapat menabung dalam batas waktu yang ditentukan? Bagaimana BMT menyikapinya?
14. Bagaimana mekanisme bonus pada Si Wadiah?
15. Kapan perhitungan bagi hasil ditetapkan?
16. Kapan pemberian hadiah dilaksanakan?

17. Bagaimana mekanisme pengundian hadiah pada produk Si Wadiah?
18. Setelah pengundian dan pemberian hadiah dilakukan, keuntungan mendasar apa yang didapat BMT?
19. Apakah produk Si Wadiah ini merupakan produk unggulan BMT?
  - a. Jika iya, bagaimana persentase data peserta dalam tiga tahun terakhir?
  - b. Jika tidak, adakah cara lain untuk lebih membuat daya tarik kepada anggota agar bergabung? Apakah dengan mempertahankan produk Si Wadiah, atau ada gebrakan lain?
20. Apakah menurut Bapak/Ibu produk Si Wadiah sudah mengimplementasikan ketentuan yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah?
21. Adakah pertimbangan atau dasar lain selain fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nahla Nadira Rahmah  
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 03 Januari 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. H. Syatori No. 20 RT 004/ RW011 Kauman  
Brebes, Kec. Brebes Kab. Brebes, Jawa Tengah,  
52212  
No HP : 0817-7958-6481  
Email : [nahlanadirarahmah@gmail.com](mailto:nahlanadirarahmah@gmail.com)

### Pendidikan Formal:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. TK Pertiwi Setda Brebes | Tahun 2003-2004 |
| 2. MI Negeri Brebes        | Tahun 2004-2010 |
| 3. MTs Negeri 2 Brebes     | Tahun 2010-2013 |
| 4. SMA Negeri 1 Brebes     | Tahun 2013-2016 |
| 5. UIN Walisongo Semarang  | Tahun 2016-2019 |